RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2017

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dimana perencanaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah yaitu pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Perencanaan Pembangunan Daerah harus dilakukan sebelum anggaran dan kegiatan untuk tahun yang akan datang berjalan, yaitu melakukan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan potensi daerahnya. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang Perencanaan Jangka Panjang. Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN).

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh

dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Permendgri Nomor 54 tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

1. Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Renja PD merupakan penjabaran Renstra Pemerintah Daerah yang mengacu pada RKPD
3. Renja PD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
4. Renja PD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan pemerintah daerah sesuai tupoksinya.

Upaya pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau dilandaskan atas potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana serta sarana pendukung produksi. Faktor pendukung produksi juga meliputi peraturan perundang-undangan yang kondusif bagi pengembangan usaha perikanan dan kelautan, permodalan, pembinaan dan

pendampingan.

Selanjutnya, pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Riau juga merupakan upaya pemberian berbagai alternatif pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (*walfare*) hidupnya, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat pembudidaya ikan, nelayan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan basis komoditas lokal yang kompetitif berlandaskan kemampuan regional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Realitas pembangunan di masa lalu, yang berorientasi ke darat (*terrasterial*) menyebabkan pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan yang tersedia lebih diprioritaskan pada sektor daratan. Sementara daya dukung (*carring capacity*) sumberdaya di darat dari waktu ke waktu semakin berkurang. Pada sisi lain, jumlah penduduk semakin meningkat. Berdasarkan fakta ini, tentu permintaan akan komoditas perikanan dan kelautan dalam berbagai bentuk di masa yang akan datang terus meningkat. Berbagai kendala masih dihadapi, namun peran sektor perikanan dan kelautan dalam mengisi pembangunan semakin ditingkatkan.

Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan permasalahan yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap maka bukan suatu pilihan yang salah, jika sektor perikanan dan kelautan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau saat ini dan dimasa yang akan datang.

Untuk mendayagunakan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan serta menggerakkan seluruh potensi diperlukan kesungguhan dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta dukungan politik, ekonomi dan sosial untuk menjadikan sektor perikanan dan kelautan *prime mover* (kemampuan untuk membawa organisasi mampu mencapai kompleksitas yang tinggi) pembangunan ekonomi Riau. Dengan kata lain sudah seharusnya sektor perikanan dan kelautan Riau dijadikan *main stream* (arus utama) pembangunan Riau mulai saat ini dan dimasa datang. Diharapan sektor perikanan dan kelautan dapat menjadi salah satu keunggulan komperatif, yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian daerah, sehingga saatnya sektor ini sudah menjadi prioritas pembangunan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Riau sebagai instansi teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Riau bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang perikanan dan kelautan.

Sejalan dengan dasar pikir diatas maka Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau untuk Tahun 2017. Dimana Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2018 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, sekaligus merupakan Rencana Kerja tahun ke empat RENSTRA Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2014 - 2019.

Dalam penyusunanya, Rencana kerja ini diseleraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sebagai dokumen perencanaan, maka Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja dimulai dai rencana penyusunan program/kegiatan, penyiapan rancangan awal rencana penyusunan program/kegiatan, rapat koordinasi teknis penyusunan program/kegiatan yang dihadiri oleh kabupaten/kota se Provinsi Riau, selanjutnya penyiapan rancangan rencana kerja, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, dan pada akhirnya adalah penetapan rencana kerja perangkat daerah. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah di Provinsi Riau dalam menyusun rancangan Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Penyusunan RKPD dengan pendekatan tektokratis berarti bahwa dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKPD ini berarti bahwa dalam proses penyusunan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah *(stakeholder*) di Provinsi Riau.

Rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mencapai prioritas pembangunan. Dalam dokumen rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2018 terdapat 11 program prioritas pembangunan dengan 48 kegiatan yang menjadi issu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Mangrove
   a. Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   h. Penyediaan Makanan dan Minuman
   i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
   j. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
   k. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan kehumasan SKPD
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a. Pembinaan fisik dan mental aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Siatem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Rapat koordinasi pada setiap SKPD
   b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
   c. Supervisi dan Statistik
   d. Penyediaan Jasa Pengelolaan administrasi perkantoran
6. Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut

a. Pembinaan dan pemberdayaan serta penilaian POKMASWAS
b. Gelar operasi dan pengawasan terpadu
c. Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan kapal pengawas

7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
   a. Pengembangan bibit ikan unggul
   b. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan
   c. Peningkatan sarana dan prasarana UPT pembenihan perikanan
   d. Pengembangan Teknologi anjuran perikanan budidaya
   e. Pengembangan prasarana dan sarana perikanan budidaya
   f. Peningkatan pelayanan kinerja UPT pembenihan
8. Program pengembangan perikanan tangkap
   a. Peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan
   b. Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan
   c. Pengelolaan perizinan perikanan tangkap di provinsi riau
   d. Percepatan Kartu nelayan
9. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
   a. Pengembangan nilai produk pengolahan hasil perikanan
   b. Pengembangan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan hasil perikanan
   c. Pembinaan dan pelayanan kelengkapan sertifikat pendukung bagi UMKM pengolahan hasil perikanan
   d. Pameran/bazar produk pengolahan hasil perikanan
   e. Lomba cipta menu pengolahan hasil perikanan
   f. Lomba dan penilaian UMKM terbaik se provinsi Riau
   g. Gerakan memasyarakatkan makan ikan
   h. Pembinaan dan pengawasan LPPMHP
   i. Pengujian mutu LPPMHP
   j. Peningkatan pelayanan LPPMHP
   k. Pembinaan produk perikanan non konsumsi
10. Program pengembangan sumberdaya manusia perikanan dan kelautan
    a. Pelatihan penerapan teknologi perikanan budidaya air payau
    b. Peningkatan sarana dan prasarana UPT pelatihan
    c. Peningkatan pelayanan kinerja UPT pelatihan perikanan
11. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan
    a. Peningkatan sumberdaya manusia penyuluh dan pendamping

kelautan dan perikanan

Dalam hal ini kegiatan dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai instansi yang mengurusi bidang Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud di atas untuk tahun 2018 melalui *E-planning.*

1.2. Landasan Hukum

Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2016, merupakan tindak lanjut ketentuan pasal 89, dengan sistimatika penulisan mengacu pada ketentuan pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010. Regulasi-regulasi yang menjadi acuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;
7. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerag (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2018;
18. Peraturan daerah provinsi riau nomor 36 tahun 2001 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi riau tahun 2005-2025);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
23. Pengaturan daerah provinsi riau nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi riau;
24. Peraturan gubernur nomor 84 tahun 2016 tentang kedududkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Riau;
25. Peraturan GUBERNUR Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2018

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja 2017

Maksud Penyusunan Renja ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam mencapai prioritas pembangunan perikanan dan kelautan tahun 2018.

Tujuan penyusunan Renja tahun 201 adalah untuk memastikan bahwa

Dokumen Renja sebagai bahan penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Adapun tujuan penyusunan rencana kerja secara khusus sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.
2. Memeberikan gambaran mengenai capaian pelaksanaan program kegiatan tahun dan proyeksi tahun 2017
3. Mengerahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder)* pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi pertisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2018;
4. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing bidang/unit pelaksana teknis dalam rangka pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Diskanlut Provinsi Riau tahun 2014 – 2019. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau selama tahun 2016 (N-2) dan perkiraan target tahun 2017 (N-1).

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017, dapat dilihat pada tabel T-VI.C.5 berikut.

Sad

Kode									Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan tahun 2015 s/d 2017	Target R Program kegiatan S	
													Target	Re
1									2	3	4	5	6	
1	**02**	**05**	**2**	**00**	**01**	**01**	**17**		**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Luas Kawasaan Konservasi Perairan Daerah yang dibina (ha)**	**411342,80**			
1	02	05	2	00	01	01	17	044	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang mengalami kerusakan/degradasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove di wilayah pesisir	50 ha, 1.500 meter	-	**-**	
2	**00**	**01**	**2**	**00**	**01**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik**	**100%**	**-**		
2	00	01	2	00	01	01	01	001	Penyediaan Jasa Menyurat	Jumlah surat yang ditindak lanjuti	0	28	12	
2	00	01	2	00	01	01	01	002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah rekening	108	9	12	
2	00	01	2	00	01	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan (orang)	96	10	12	
2	00	01	2	00	01	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	10	18	12	
2	00	01	2	00	01	01	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak dan dijilid	40000	10.247	12	
2	00	01	2	00	01	01	01	012	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (unit)	9	102	40	
2	00	01	2	00	01	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	4	13	8	
2	00	01	2	00	01	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan (eksemplar)	8	16	12	
2	00	01	2	00	01	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (porsi)	4800	929	380	
2	00	01	2	00	01	01	01	018	Rapat - Rapat Koordanasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75	150	65	
2	00	01	2	00	01	01	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (orang)	72	7	12	

2	00	01	2	00	01	01	01	022	Penyediaan Jasa sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD	Jumlah media informasi dan komunikasi (edisi)	2	1	2
2	**00**	**01**	**2**	**00**	**01**	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja**	**100%**	**-**	
2	00	01	2	00	01	01	02	022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara (m2)	30	3	12
2	00	01	2	00	01	01	02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara (unit)	11	-	12
2	00	01	2	00	01	01	02	026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	6	321	219
2	**00**	**01**	**2**	**00**	**01**	**01**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur**	**100%**		
2	00	01	2	00	01	01	03	006	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah fisik dan mental aparatur yang dbina (orang)	140	208	12
2	**00**	**01**	**2**	**00**	**01**	**01**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Persentase ketepatan penyampaian laporan**	**100%**		
2	00	01	2	00	01	01	06	006	Rapat Koordinasi pada Setiap SKPD	Jumlah Kab/Kota yang Menghadiri Rapat dan Kesepakatan Hasil Rakor	12	12	12
2	00	01	2	00	01	01	06	008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen) dan frekuensi monev	12	1	12
2	00	01	2	00	01	01	06	017	Supervisi dan Statistik	Jumlah laporan	1	1	1
2	00	01	2	00	01	01	06	121	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan (orang)	9	1	1
2	**00**	**01**	**2**	**00**	**01**	**01**	**17**		**Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut**	**Berkurangnya IUU Fishing**	**5 kasus**		
2	00	01	2	00	01	01	17	003	Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS	Jumlah POKWASMAS yang dibina dan di nilai	30	19	12
2	00	01	2	00	01	01	17	004	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	Jumlah gelar operasi dan pengawasan terpadu (kali)	14	14	7
2	00	01	2	00	01	01	17	010	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Jumlah kapal yang dipelihara (unit)	1	1	1
2	**00**	**01**	**2**	**00**	**01**	**01**	**20**		**Program Pembangunan Budidaya Perikanan**	**Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya**	**125.173,47**		
2	00	01	2	00	01	01	20	001	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah calon induk ikan unggul	25000	1.317	1000

2	00	01	2	00	01	01	20	004	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	15	106	8
2	00	01	2	00	01	01	20	016	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	Jumlah pengerjaan sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT Pembenihan	2	7	2
2	00	01	2	00	01	01	20	042	Pengembangan Tekhnologi Anjuran Perikanan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang menerapkan tekhnologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/orang	50	95	30
2	00	01	2	00	01	01	20	045	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	46	-	0
2	00	01	2	00	01	01	20	055	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pembenihan	Jumlah pelayanan UPT Pembenihan dalam menunjang produksi benih (paket)	2	24	3
2	**00**	**01**	**2**	**00**	**01**	**01**	**21**		**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**Meningkatnya Hasil Tangkapan Perairan Laut**	**135.603 ton**		
2	00	01	2	00	01	01	21	010	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan	Dokumen operasional pelabuhan perikanan	1	1	1
2	00	01	2	00	01	01	21	014	Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap	Jumlah kapal dan alat tangkap ikan untuk masyarakat nelayan	15	-	0
2	00	01	2	00	01	01	21	053	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	Jumlah perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan (surat izin)	50	-	7
2	00	01	2	00	01	01	21	054	Percepatan Kartu Nelayan	Jumlah nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)	4.600	-	0
2	**00**	**01**	**2**	**00**	**01**	**01**	**23**		**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan**	**Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pemasaran Nilai Ekspor Produk Perikanan**	**10 unit Usaha : US$ 8.800**		
2	00	01	2	00	01	01	23	035	Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah pengolah hasil perikanan yang terampil (orang)	60	-	100
2	00	01	2	00	01	01	23	038	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	45	-	75
2	00	01	2	00	01	01	23	041	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah serftifikat yang diberikan bagi UMKM pengolahan hasil perikanan	5	-	3
2	00	01	2	00	01	01	23	044	Pameran/ Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah keikutsertaan dalam pameran/bazar produk pengolahan hasil perikanan (kali)	48	-	6

2	00	01	2	00	01	01	23	045	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah inovasi menu serba ikan	36	-	45
2	00	01	2	00	01	01	23	052	Lomba dan Penilaian UMKM terbaik se-Provinsi Riau	Jumlah UMKM yang memenuhi persyaratan lomba / penilaian terbaik	12	-	3
2	00	01	2	00	01	01	23	053	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah sosialisasi GEMARIKAN (kali)	4	-	0
2	00	01	2	00	01	01	23	054	Pembinaan dan Pengawasan LPPMHP	Tercapainya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan di Provinsi Riau (unit) UMKM	12 UPI (UMKM)	-	0
2	00	01	2	00	01	01	23	055	Pengujian Mutu LPPMHP	Peningkatan sumberdaya manusia LPPMHP; jumlah sampel yang diuji	25 orang; 100 sampel uji	-	0
2	00	01	2	00	01	01	23	056	Peningkatan Pelayanan LPPMHP	Meningkatnya jumlah sarana prasarana; jumlah tenaga pelayanan LPPMHP	1 unit; 4 personel	1	0
2	00	01	2	00	01	01	23	057	Pembinaan Produk Perikanan Non Konsumsi	Jumlah pengolah hasil produk non konsumsi yang terampil	25 orang	1	1
2	**00**	**01**	**2**	**00**	**01**	**01**	**27**		**Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan**	**Peningkatan jumlah SDM bidang perikanan dan kelautan yang bersertifikat (CPIP dan CBIB)**	**50**		
2	00	01	2	00	01	01	27	005	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	Jumlah petambak yang terlatih (orang)	50	75	20
2	00	01	2	00	01	01	27	009	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	Jumlah sarana dan prasarana UPT pelatihan dalam mendukung operasional pelatihan (unit)	1	1	1
2	00	01	2	00	01	01	27	017	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Jumlah pelayanan operasional UPT pelatihan dalam menunjang pelatihan	1	1	1
2	**00**	**03**	**2**	**00**	**01**	**01**	**20**		**Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan**	**Terwujudnya pengembangan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan**	**100 orang**		
2	00	03	2	00	01	01	20	036	Peningkatan Sumberdaya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembinaan penyuluh dan pendamping dalam mendukung pengembangan kelautan dan perikanan (orang/kelompok)	4	-	1

Capaian target keuangan tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dilihat dari realisasi seluruh kegiatan pada dinas kelautan dan perikanan provinsi riau selama 12 bulan, yaitu terhitung tangggal 1 januari s/d 31 desember 2016.

Tabel 1. Alokasi dan realisasi anggaran per program Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Riau tahun 2016.

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Perkantoran Pelayanan Administrasi	2,778677,431,00	2,579,685,535	92,84
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	441,496,000,00	293,837,967	66,56
3	Peningkatan disiplin aparatur	156,976,065,00	124,240,000	79,15
4	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	810,250,694,00	584,854,900	72,18
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	923,517,326,00	810,575,800	87,77
6	Pengembangan data/informasi	907,835,332,00	565,500,000	62,29
7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	6,553,111,000,00	4,680,507,200	71,64
8	Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	2,815,886,000,00	1,930,740,750	68,57
9	Pengembangan budidaya	9,819,809,348,36	8,156,659,900	83,06

	perikanan			
10	Pengembangan perikanan tangkap	5,033,145,553,00	4,235,146,660	84,15
11	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	6,398,272,000,00	5,192,409,576	81,15
12	Pengembangan konservasi sumberdaya perikanan kelautan	2,274,970,000,00	1,561,883,000	68,66
13	Pengembangan sumber daya manusia perikanan dan kelautan	8,002,915,512,00	7,565,235,612	94,53
JUMLAH BELANJA		46,896,895,261,36	38,281,726,900,00	81,63

Sumber : sub bagian keuangan, perlengkapan dan PBMD

Dilihat dari tabel diatas program pengembangan budidaya perikanan memiliki alokasi anggaran yang paling besar dalam rangka peningkatan produksi perikanan yaitu Rp. 9,819,809,348,36 atau 20,94% dari pagu anggaran, hal ini disebabkan kebijakan pembangunan perikanana dan kelautan di provinsi riau masih mengarah kepada peningkatan produksi budidaya, dimana potensi lahan budidaya sebanyak 106.429,44 ha yang terdiri dari budidaya air tawar (65.973,72 ha), budidaya air payau (39.123,22 ha) dan budidaya air laut (1.332,50 ha) dan baru dimanfaatkan sebesar 10,4% sehingga masih terbuka luas dalam pengembangan budidaya dalam rangka penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Per Bidang/UPT Lingkup Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau 2016.

No	BIDANG/UPT	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Sekretariat	5,232,708,798,00	4,499,004,202,00	85,98
2	Kelautan dan Pengawasan	12,123,967,000,00	8,632,820,950,00	71,20

3	Budidaya Perikanan	4,531,093,000,00	2,951,133,100,00	65,13
4	Perikanan Tangkap	3,136,093,000,00	2,565,425,050,00	81,80
5	P2HP	3,790,509,000,00	3,156,731,025,00	83,13
6	UPT.Pembenihan	5,574,412,000,00	5,205,526,800	93,38
7	UPT.Pelabuhan	1,897,052,553,00	1,669,721,610,00	88,02
8	UPT.LPPMHP	2,600,763,000,00	2,035,678,551,00	78,27
9	UPT.Pelatihan	8,002,912,512,00	7,565,236,612,00	94,53
JUMLAH		46,896,859,261,36	38,281,276,900,00	81,63

Sumber : sub bagian keuangan, perlengkapan dan PBMD

Pada beberapa Bidang/UPT kinerja keuangan sudah di atas 70%, tetapi penyerapan paling rendah berada pada bidang perikanan budidaya yaitu 65,13% hal ini disebabkan oleh kegiatan Masterplan pengembangan perikanan dan kelautan provinsi riau tidak dilaksanakan sedangkan seluruh kegiatan yang lain dibidang perikanan budidaya terlaksana diatas 70% sedangkan penyerapan tertinggi pada UPT.Pelatihan 94,05%.

Berdasarkan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016 secara tugas dan fungsinya terdiri dari 8 rogram, secara rinci hasil kegiatan yaitu pelaksanaan program pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir terdiri dari 2 (dua) kegiatan, Alokasi anggaran Rp. 4.680.507.200,- dengan realisasi keuangan sebesar 71,64% dan realisasi fisik 74,10%.

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut terdiri dari 6 (enam) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 1.930.740.750,- dengan realisasi keuangan sebesar 68,57% dan realisasi fisik 70,2%. Program pengembangan budidaya perikanan terdiri dari 24 (dua puluh empat) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 8.156.659.900,- dengan

realisasi keuangan sebesar 83,06% dan realisasi fisik 86,59%. Program pengembangan perikanan Tangkap terdiri dari 15(lima belas) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 4.235.146.660,- dengan realisasi keuangan sebesar 84,15% dan realisasi fisik 88,47%.

Selanjutnya program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 5.192.409.576,- dengan realisasi keuangan sebesar 81,15% dan realisasi fisik 82%. Program pengembangan Konservasi sumberdaya perikanan kelautan terdiri dari 5 (lima) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 1.561.883.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 68,66% dan realisasi fisik 69%. Progam pegembangan sumberdaya manusia perikanan dan kelautan terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 7.565.235.612,- dengan realisasi keuangan sebesar 94,535 dan realisasi fisik 95%.

Program pengembangan data/informasi terdiri dari 2 (dua) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 565.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 62,69% dan realisasi fisik 87,25%. Sedangkan program pendukung rutin Dinas kelautan dan perikanan provinsi riau dengan 5 (lima) program secara rincian pelaksanaanny yaitu : program pelayanan perkantoran terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 2.579.685.535,- dengan realisasi keuangan sebesar 92,84% dan realisasi fisik 95%. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 293.837.967,- dengan realisasi keuangan sebesar 66,56% dan realisasi fisik 70,25%. Program didiplin aparatur terdiri dari2 (dua) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 124.240.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 79,15%vdan realisasi fisik 80%.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan, alokasi anggran Rp. 584.854.900,- dengan realisasi keuangan sebesar 72,18% dan realisasi fisik 77%. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, alokasi anggaran Rp. 810.575.800,- dengan realisasi keuangan sebesar 94,53% dan realiasi fisik 95%.

Apapun permasalahan dan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelauatan dan perikanan provinsi riau pada tahun 2016 sebagai berikut :

a. Realisasi belanja hibah dan abntuan sosial tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dengan persyaratan hibah yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri RI nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

b. Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar walaupun yang dihasilkan dalam jumlah besar, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan.

c. Perencanaan penganggaran (RKA) belum singkron dengan standar biaya yang diataur melalui pergub karena belum berhasil mengintegrasikan secara baik antara e-planning dengan e-budgetting. Keadaan ini menyebabkan tidak terlaksananya 4 (empat) kegiatan dengan jumlah rencana biaya Rp. 2.302.506.350,00

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor penyebab rendahnya capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan perikanan provinsi riau adalah

a. Untuk meningkatkan produksi perikanan baik budidaya maupun tangkap perlu diberikan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat yang berpedoman kepada aturan yang ada.

b. Agar proses hibah tidak salah sasaran maka diperlukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelompok calon penerima hibah dan berkoordinasi dengan dinas perikanan kabupaten/kota.

c. Perlu penyempurnaan integrasi sistem antara *e-planning* dengan *e-budgetting* pada tahun 2017.

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas kelautan dan perikanan provinsi riau tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, evaluasi pelaksanaan rencana kerja adalah sebagai berikut :

1. *Produksi perikanan budidaya*

Capaian sementara jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2016 yaitu 90.378,08 ton atau (89,67%) dari target sebesar 100.787,52 ton. Angka tersebut terbagi ke dalam berbagai jenis komoditas dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2016

IKU	Target (ton)	Realisasi	(%)
Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	100.787,52	90.378,08*	89,67

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya

Pertumbuhan produksi perikanan budidaya terjadi kecenderungan negatif yaitu mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana dari tahun 2015 ke tahun 2016 produksi perikanan budidaya menurun sebesar 15,72%. Komoditas ikan air tawar mendominasi produksi perikanan budidaya dibandingkan komoditas ikan laut. Jenis ikan air tawar yang tingkat pertumbuhannya tinggi adalah ikan gurami, lele, gabus dan patin.

Tabel 4. Capaian volume produksi perikanan budidaya sesuai jenis komoditas antara tahun 2015 dan 2016

No	Komoditas	Produksi (ton)		Growth (%)
		2015	2016	
1	Mas	43.664,97	23.071,85	(47,16)
2	Nila	12.555,45	11.894,20	(5,27)
3	Gurami	712,35	953,87	33,90
4	Patin	30.961,20	32.700,32	5,62
5	Lele	14.802,22	16.488,11	11,39
6	Jelawat	1.903,03	-	0
7	Gabus	2,00	2,50	25

8	Bawal air tawar	656,94	-	0
9	Baung	1.042,71	-	0
10	Kakap	0,20	15,02	7,41
11	Bandeng	61,99	553,40	792,72
12	Kerang Darah	536,47	-	0
13	Ikan lainnya	323,16	4.526,86	1.300,81
14	Udang windu	8,14	85,70	952,82
15	Udang Putih	0,50	51,61	10.222,00
16	Udang Vanname	2,26	34,64	1.432,74
17	Udang lainnya	-	-	0
18	Kepiting	-	-	0
TOTAL		107.233,59	90.378,08	(15,72)

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya

Dari tabel juga memperlihatkan produksi budidaya air payau mengalami peningkatan seperti udang putih, udang vanname, udang windu dan ikan bandeng. Dari harga jual atau nilai produksi budidaya air payau apabila dibandingkan dengan nilai produksi budidaya air tawar lebih besar nilai produksi budidaya air payau hal ini dikarenakan nilai jual budidaya air payau “besar” misalnya ikan patin hanya Rp. 15.000,00. Hal ini tentu berpengaruh pada total nilai produksi perikanan budidaya khususnya budidaya air payau.

Untuk mengetahui pertumbuhan rumah tangga perikanan budidaya pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perbandingan RTP Budidaya perikanan tahun 2015 dan 2016.

No	Komoditas	Produksi (ton)		Growth (%)
		2015	2016	
1	Jaring apung laut	18	18	0

2	Tambak	281	520	85,05
3	Kolam	22.115	19.720	(10,83)
4	Keramba	3.846	532	(86,17)
5	Jaring tancap	72	151	109,72
6	Jaring apung	508	643	26,57
7	Minapadi	-	-	-
TOTAL		26.840	21.911	(18,36)

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya

Dari tabel diatas diketahui bahwa rumah tangga perikanan budidaya yang mengalami peningkatan adalah budidaya jaring tancap dan tangkap. Budidaya jaring tancap didominasi dari usaha budidaya di kabupaten Rokan Hilir berupa budidaya kerang darah namun produksi sampai saat ini belum diketahui sedangkan budidaya tambak didominasi dari kabupaten bengkalis dimana dengan adanya harga jual yang sangat bagus untuk udang vanname, pertambak mulai mengaktifkan kembali tambak-tambak yang selama ini idle/terbengkalai.

Secara keseluruhan, beberapa hambatan yang dihadapi dalam peningkatan produksi perikanan budidaya adalah : (i) adanya banjir pada awal tahun yang terjadi di kabupaten Kampar sehingga menyebabkan produksi menurun, (ii) tidak terealisasikannya kegiatan revitalisasi kawasan budidaya air laut, payau dan tawar dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disebabkan oleh tidak ada kelompok yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan kepada masyarakat, (iii) harga pakan yang tinggi, (iv) kurangnya benih berkualitas dan induk bermutu, dikarenakan manajemen pengelolaan induk serta peranan UPTD dalam penyediaan induk belum maksimal; (v) informasi ketersediaan dan distribusi demi terbatas; (vi) lemahnya akses permodalan serta masih kurangnya minat investasi terhadap usaha perikanan budidaya; (vii) keterbatasan modal; serta (viii) kurangnya jaminan pemasaran dan harga.

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilaksanakan di masa yang akan datang antara lain adalah :

1. Banjir musiman yang terjadi di Kabupaten Kampar pada awal tahun sebaiknya diantisipasi dengan waspada banjir dan menjaga agar keramba tidak hanyut dan kolam-kolam ikannya tidak lepas dengan cara memberikan jaring. Untuk mengatasi permasalahan tingginya harga pakan, maka perlu dilakukan; (i) pengembangan teknologi inovatif untuk pakan buatan mandiri; (ii) memberikan paket bantuan mesin pelet dengan harapan pembudidaya dapat membuat pakan mandiri dengan harga yang lebih murah dari pada harga pakan pabrik; (iii) pengembangan sistem mutu pakan, (iv) penilaian pakan, serta (v) pengawasan pengadaan dan peredaran pakan/bahan baku pakan.
2. Menigkatkan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya dan sosialisasi kepada masyarakat agar mau dan melengkapi persyaratan bantuan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pengembangan pasar serta pembangunan unit pengolahan ikan pada sentra-sentra produksi perikanan budidaya.
4. Meningkatkan peran serta fasilitas pembenihan di UPTD dalam mendukung produksi calon induk unggul untuk mencapai pemenuhan benih berkualitas.
5. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya
6. Pegembangan kawasan perikanan budidaya
7. Pengembangan usaha budidaya ke usaha budidaya air payau dan laut yang saat ini masih belum tergarap secara maksimal. Apabila dibandingkan nilai jual hasil budidaya air tawar dengan budidaya air payau dan laut maka akan diperoleh penghasilan yang jauh berbeda karena hasil produksi budidaya air payau dan laut biasanya berorientasi eksport sedangkan hasil produksi budidaya air tawar hanya untuk konsumsi dalam negeri.

B. Produksi Perikanan Tangkap

Indikator jumlah produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari produksi yang didaratkan nelayan dan hasil estimasi yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan /pendataan statistik perikanan tangkap.

Tabel 6. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016.

IKU	Target (ton)	Realisasi	(%)
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	132.261,00	129.384,1*	97,82

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap

Berdasarkan data sementara volume produksi perikanan tangkap yang telah dicapai sebesar 129.675,60 ton atau 97,82% dari target yang ditetapkan sebesar 132.261,00 ton. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena produktifitas sumberdaya ikan menurun di wilayah tertentu (Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis), Anomali cuaca yang menyebabkan nelayan tidak dapat melaut, dan data yang ada belum dilakukan validasi (angka sementara).

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Jenis Perairan Tahun 2015 dan 2016

NO	PRODUKSI (TON)	TAHUN		Growth%
		2015	2016	
1	Laut	104.703,0	102,458,2	(2,14)
2	Sungai	15.627,7	25.469,5	62,98
3	Danau	1.470,1	1.456,3	(0,94)
Jumlah		121.800,8	129.384,1	6,23

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap

Berdasarkan data tabel diatas, pertumbuhan produksi perikanan tangkap tahun 2016 terbesar disumbangkan oleh perikanan tangkap di perairan sungai sebesar 25.469,5 ton (62,98%) dengan nilai produksi sebesar Rp. 799.232.054,00 (12,68%).

Penyerapan tenaga kerja masih menjadi salah satu kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping sebagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran serta mewujudkan salah satu pilar pembangunan yaitu *pro-job* (penyerapan tenaga kerja).

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal

bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga umumnya terdiri dari ibu, bapak, anak, orang tua/mertua,famili, pembantu dan lainnya (BPS). Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Rumah tangga perikanan tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk di jual. Tabel 8. Perbandingan jumlah RTP penangkapan tahun 2015 dan 2016.

No	RTP PENANGKAPAN	JUMLAH		Growth %
		2015	2016	
1	Penangkapan di laut	14.763	12.113	(17,95)
2	Penangkapan di perairan Umum Daratan	13.920	13.942	0,16
JUMLAH		28.683	26.055	(9,1)

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap

Melihat dari pekembangan jumlah rumah tangga perikanan tangkap pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,16% maka sejalan dengan produksi yang dihasilkan dari perikanan tangkap yang bersumber dari penangkapan ikan di perairan umum daratan. Sedangkan jumlah rumah tangga perikanan penangkapan di laut mengalami penurunan sebesar 17,95% hal ini disebabkan banyak nelayan yang beralih profesi menjadi buruh kasar dikarenakan pengaruh anomali cuaca sehingga mereka tidak bisa melaut pada waktu yang lama yang pada akhirnya berdampak dariproduksi perikanan tangkap di laut yang mengalami penurunan sebesar 2,14% dari tahun 2015.

C. Meningkatkan Konsumsi Ikan

Berdasarkan data sementara angka konsumsi ikan Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar 40,0 kg/kapita/tahun atau 95,23% dari target yang ditetapkan sebesar 42,0 kg/kapita/tahun. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena data angka konsumsi ikan dari kabupaten indragiri hulu, kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir belum ada (biasanya angka konsumsi ikan di Provinsi Riau diperoleh pada akhir tahun 2017). Hal terpenting yang mempengaruhi pencapaian angka konsumsi ikan adalah menurunnya capaian produksi perikanan pada tahun 2016 baik produksi perikanan budidaya maupun produksi perikanan tangkap.

Untuk mengetahui angka konsumsi ikan per kapita di Provinsi Riau pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 9. Konsumsi ikan per kapita Provinsi Riau tahun 2016

IKU	Target	Reaisasi	(%)
Konsumsi ikan per kapita (kg/kapita/tahun)	42	40,0*	95,23

Sumber : Bidang P2HKP

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target angka konsumsi ikan adalah lomba dan penilaian unit pengelola ikan (UPI) dan UMKM Terbaik se Provinsi Riau, pengembangan kelembagaan KKMB, peningkatan saran dan prasarana produk pengolahan perikanan, bimbingan Teknis perhitungan angka konsumsi ikan, pengembangan nilai produk pengolahan hasil perikanan, industrialisasi pengelolaan hasil perikanan di Provinsi Riau, pembangunan sarana dan prasarana mendukung sentra pengolahan hasil perikanan, pengembangan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengelolaan hasil perikanan, pendampingan usaha UMKM pengolahan hasil perikanan dan pengusaha pemasaran, monev kelembagaan UMKM pegnolahan hasil perikanan, pembinaan dan pelayanan kelengkapan sertifikat pendukung bagi UMKM pengolahan hasil perikanan, Bimtek eksportir pengolahan hasil perikanan, pembinaan produk perikana non konsumsi Provinsi Riau, lomba cipta menu pengolahan hasil perikanan, pameran/bazar produk pengolahan hasil perikanan, dan sosialisasi GEMARIKAN melaui media elektronik dan cetak.

Keseluruhan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan produk perikanan dan mendorong peningkatan permintaan produk perikanan serta peningkatan angka konsumsi ikan di Provinsi Riau.

D. Luas kawasan Konservasi Perairan daerah

Indikator ini dihitung dari capaian luas kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pada tahun 2016 target luasan kawasan konservasi perairan daerah 34 Ha , sementara capainnya adalah sebesar 23.491,32 Ha atau 690,62%.

Tabel 10. Capaian Luas Kawasan Perairan Daerah Tahun 2016 di Provinsi Riau

IKU	Target	Realisasi	(%)
Luas kawasan konservasi perairan daerah (Ha)	34	23.491,32	690,62

Sumber : Bidang Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan tabel di atas, capaian target luas kawasan konservasi perairan daerah diperoleh dari kegiatan di suaka pulau kecil kepulauan Aruah Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan yang dilakukan merupakan kelanjutan untuk peningkatan kawasan konservasi di Provinsi Riau. Sebelumnya pada tahun 2012 berdasar Peraturan Gubernur Riau No.78 Tahun 2012, telah menetapkan Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Siak sebagai kawasan konservasi ikan Terubuk, dan pada tahun 2014 telah dibentuk Forum Koordinasi pengelola Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Provinsi Riau yang ditetapkan melalui surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.823/XII/2014. Pengelolaan suaka perikanan Ikan Terubuk ditujukan untuk memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem, membangun kerjasama antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat yang berazaskan kemitraan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target luas

kawasan konservasi perairan daerah adalah Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove di Pesisir, Penyusunan Dokumen KKLD, Perlindungan dan Pengkayaan Sumberdaya Ikan, Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Konservasi, dan Pengelolaan Kawasan Koservasi Ikan Terubuk.

Upaya yang dilakukan tidak hanya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi melebihi target yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam rangka penambahan luas kawasan konservasi ini dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota disejumlah lokasi potensial yang memiliki komitmen untuk mencadangkan sebagian wilayah perairannya sebagai kawasan konservasi pada tahun 2016.

E. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan

Pengembangan sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatifitas, disiplin, profesional, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan dimasa yang akan datang.

Capaian jumlah sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan yang dilatih pada tahun 2016 terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat sebanyak 1064 orang dari target sebanyak 350 orang atau 304%. Untuk mengetahui capaian jumlah sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Capaian Jumlah Sumberdaya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan Tahun 2016 di Provinsi Riau.

IKU	Target	Realisasi	(%)
Jumlah sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan yang dilatih (orang)	350	1.064	304

Sumber : UPT Pelatihan dan Kelautan

Berdasarkan tabel di atas, capaian target kualitas sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan tidak hanya dilakukan oleh unit pelaksana teknis pelatihan perikanan (sebanyak 244 orang) tapi juga dilakukan oleh bidang perikanan budidaya (sebanyak 322 orang), bidang perikanan tangkap (571 orang), bidang pengolahan dan pemsaran hasil perikanan (440 orang) serta sekretariat (63 orang).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target pengembangan sumberdaya manusia perikanan dan kelautan adalah :

a. Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Laut
b. Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Tawar
c. Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya air payau
d. Pelatihan Penerapan Teknologi pengendalian penyakit ikan
e. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
f. Pelatihan basic Safety Training

Untuk mengetahui pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel T-VI. C. 1.

Tabel. T-VI.C.1

Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2015 (tahun n-2)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	Tahun 2015 (tahun n-2)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	0	0	133.209,00	132.261,00	134.261,00	135.603,00	107.233,59	129,384.10 *	134.261,00	135.603,00	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budiaya	Ton	0	0	123.471,75	100.787,52	111.762,02	125.173,47	106.233,10	90,378.08 *	111.762,02	125.173,47	
5	Meningkatnya Konsumsi Ikan Per Kapita	Kg/Kapita/Thn	0	0	41,00	42,00	42,06	42,18	41,10	40.00 *	42,06	42,18	
9	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Ha	0	0	26,00	34,00	42,00	50,00	175,00	23.491,32	42,00	50,00	
11	Jumlah Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan yang dilatih	Orang	0	0	98,00	350,00	539,00	578,00	95,00	1.064,00	539,00	578,00	

*Angka sementara sebelum divalidasi

Pekanbaru, Juni 2017

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

NIP. 19630512 199303 1 006

2.3. su-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Riau dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah melakukan upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD. Aspek perencanaan sebagaimana diamanatkan undang-undang secaraa terus menerus, memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down.* Pelaksanaan Mursrenbang, forum konsultasi publik dan proses koordinasi antar sektor pembangunan adalah upaya dalam pengayaan input-input pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Isu kritis/strategis adalaah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan dimasa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menetapkan isu kritis/strategis dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. **Kerusakan Lingkungan, Bencana dan Dampak Perubahan Iklim**

   Meningkatnya aktifitas pengelolaan sumberdaya di kawasan pesisir dan pantai yang tidak memperhatikan kiadah-kaidah pelestarian lingkungan serta pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang mencemari perairan, telah megakibatkan berbagai

kerusakan pada kawasan magrove, terumbu karang, aliran sungai yang mengakibatkan menurunnya kualitas perairan sehingga sumberdaya perairan menjadi berkurang dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan.

Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan lebih intensif pada kelompok masyarakat pengelola sumberdaya perikanan agar berperan aktif pada pengelolaan sumberdaya ikan secara lestari, ramah lingkungan dan ikut serta merehabilitasi kerusakan ekosistem bakau maupun terumbu karang serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang menangani pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa pada daerah hutan bakau yang menyebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Seterusnya dilakukan pengendalian dan pengawasan sumberdaya Ikan (SDI) melalui rehabilitasi dan konservasi mangrove, terumbu karang, pemasangan rumpon, pengalihan usaha penangkapan ikan (dari wilayah padat tangkap ke wilayah jarang tangkap), penawaran mata pencaharian alternatif di bidang budidaya perikanan dan penanganan hasil perikanan, serta pasca panen, peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia (SDM) baik teknik penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta peningkatan pengetahuan dan pembinaan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, solusi yang ditawarkan untuk menjaga kelestarian hutan bakau adalah mengarahkan pokwasmas agar mengambil peran aktif pada kegiatan hutan kemasyarakatan dan hutan desa khususnya yang berada di daerah hutan bakau. Harapan dari solusi tawaran ini adalah masyarakat nelayan pada gilirannya akan mengambil manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi dari keberadaan hutan bakau yang ada di sekitar pemukiman nelayan.

2. Penurunan Potensi Sumberdaya Ikan (SDI)

Penurunan produksi sumberdaya ikan berada pada perikanan tangkap di laut dan perairan umum, kondisi ini terjadi pada perairan

laut disekitar pesisir dan di bawah 4 mil sudah mengalami *over fishing* karena kapal-kapal perikanan yang beroperasi tidak bermesindan dibawah 5 GT sudah melebihi quota dan harus dilakukan penangkapan ke laut yang lebih jauh diatas 4 mil namun dengan upaya motorisasi dan peningkatan mesin diatas 5 GT.

Pencemaran oleh PETI di sungai merupakan sebab utama menurunnya hasil tangkapan nelayan di perairan umum, hal ini terlihat dengan kwalitas air sungai yang keruh dan terkontamisasi logam berat sehingga ikan tidak bisa hidup dan beruaya ke tempat lain.

3. Pengawasan Sumber Daya Ikan belum Optimal

Pemanfaatan potensi sumberdaya ikan yang tidak berkelanjutan, dan yang tidak *pro* lingkungan mengakibatkan terjadinya degradasi habitat di wilayah pesisir, terumbu karang, mangrove, dan perairan umum. Di sisi lain, kelebihan tangkap (*overfishing*) dan penurunan kualitas lingkungan juga disebabkan adanya pencemaran perairan oleh limbah industri serta limbah rumah tangga (*domestic waste*), serta penggunaan bahan peledak (*potassium)* dalam penangkapan ikan. Tentu semuanya, dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan sangat berpengaruh pada kualitas potensi sumber daya ikan, dan selanjutnya pada pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.

Statement tersebut bukan tidak beralasan. Adanya aktifitas IUU *(Illegal fishing, unreport fishing dan unregulated fishing)* pada perairan laut dan perairan umum, dan sorotan pemberitaan media massa. IUU sering terjadi pada WPP 571 (selat melaka), dan khusus pada perairan umum IUU adalah pada kelompok pengguna alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (listrik, *potasium*, tuba dan lainnya).

Keberadaan kapal pengawas perikanan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, serta yang ada pada beberapa daerah kabupaten aktifitas IUU yang terjadi sebenarnya dapat diminimalkan. Permasalahannya adalah aparat petugas pada kapal tersebut , khususnya kapal pengawas milik Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau masih sedikit/terbatas yang memiliki sertifikat pengawas SDI dan sertifikat PPNS, sebagaimana yang dipersyaratkan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak berjalan optimal. Penindakan tidak dapat dilakukan. Kewenangan tindakan pemeriksaan dan penghentian aktifitas IUU di lapangan hanya dapat dilakukan oleh petugas besertifikat tersebut.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Riau, baik di perairan laut maupun di perairan umum sudah sangat terbatas dan tergolong lebih tangkap, dan padat tangkap sebagaimana uraian di atas. Perikanan tangkap di Provinsi Riau sudah saatnya untuk dikendalikan.

Perencanaan ke depan perikanan Riau adalah perikanan budidaya dan sudah saatnya dikembangkan sesuai dengan keunggulan kompetitif di setiap daerah kabupaten kota.

Dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan yang “mengedepankan perikanan budidaya dan mengendalikan perikanan tangkap” perlu dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana perikanan. Jika tidak akan berdampak pada sentra produksi, yakni tingginya biaya produksi hasil-hasil kelautan da perikanan.

Faktanya, masih terbatas akses ke sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, khususnya pada perikanan tangkap. Pada usaha perikanan lepas pantai, infrastruktur belum memadai untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang ada. Sarana dan prasarana serta aparatur yang ada pada PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) belum memenuhi standar operasional. Untuk itu perlu melanjutkan serta penyempurnaan secara bertahap pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana usaha perikanan melalui dukungan APBN dan APBD Provinsi Riau, maupun sumber dana lainnya serta mengusulkan penambahan personal termasuk aparatur penyuluh perikanan, khususnya yang menangani operasional PPI.

Selanjutnya, tingginya harga pakan merupakan masalah pada

pengembangan perikanan budidaya. Harga pakan pabrikan masih relatif tinggi, dan ada kecenderungan akan terus meningkat sejalan dengan ketergantungan akan impor bahan baku pakan dan sudah tentu harga akan disesuaikan dengan nilai tukar *(kurs)* dollar. Hal ini mengakibatkan biaya produksi usaha pembudidayaan ikan menjadi tinggi, sementara harga jual cenderung statis (tidak menunjukan peningkatan harga yang signifikan), dan pada gilirannya tingkat keuntungan yang diterima pembudidaya rendah. Untuk itu, perlu pengembangan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal melalui pengadaan mesin pakan, pengadaan bahan baku alternatif, yang mudah didapat dan murah harganya.

Disisi lain, jumlah dan mutu benih serta induk ikan belum memadai.ketersediaan benih dan induk baik dari segi jumlah maupun mutu masih sangat rendah, sementara kebutuhan akan benih dan induk guna memenuhi target produksi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Untuk itu, perlu upaya optimalisasi peran dan fungsi balai benih ikan sentral (BBIS), balai benih ikan (BBI) lokal, kolam pembenihan rakyat (KPR) dan unit pembenihan rakyat (UPR) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas calon induk ikan unggul dan peningkatan produksi benih, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan teknologi perbenihan serta penerapan sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB).

5. **Konflik Antar Nelayan dan Tindak Pidana Perikanan.**

Penemuan, pengembangan, dan penerapan teknologi penangkapan ikan, yang mengarah pada modernisasi alat penangkapan ikan cenderung memicu kecemburuan sosial diantara masyarakat nelayan. Dampaknya, adalah perebutan sumberdaya ikan, yang tidak seimbang antara nelayan tradisional dengan nelayan pengguna modernisasi teknologi penangkapan ikan, dan modernisasi kapal perikanan tangkap.

Pada sisi lain, lemahnya pengawasan peruntukan jalur-jalur penangkapan ikan, para nelayan tradisional merasa peruntukan *fishing* area-nya terganggu dan terancam. Alat penangkapan milik

mereka, khususnya alat penangkapan ikan yang bersifat statis sering tergerus, rusak dan putus oleh aktivitas *illegal fishing*. Di samping itu,lalu lalang kapal-kapal penangkap ikan dapat mengalihkan arah renang ikan dari alat tangkap yang mereka pasang, sehingga mempengaruhi prouktivitas mereka.

Permasalahan tersebut sering berujung pada konflik antar nelayan dalam satu kawasan. Sebutlah konflik yang terjadi di perairan bantan, kembung luar, dan wilayah perairan selat malaka lainnya, dan pada perairan sekitar indragiri hilir. Secara umum, konflik nelayan yang terjadi sering berujung pada tindak pidana perikanan. Pemicunya adalah perebutan sumberdaya ikan, sebagai akibat dari menurunnya kualitas sunberdaya kelautan dan perikanan.

Faktor lain adalah kecemburuan sosial dan kecemburuan ekonomi pada pengguna alat tangkap dan bahan terlarang, perebutan daerah penangkapan (*fishing ground),* pelanggaran jalur penangkapan, pengrusakan lingkungan/penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.

6. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam

Kebijakan tentang penyelamatan sumberdaya perikanan telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam rangka gerakan nasional penyelamatan sumberdaya sektor kelautan yang ditranslasikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan adalah dengan melakukan moratorium terhadap perizinan penangkapan ikan.

Kebijakan moratorium ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi terhadap semua perizinan bidang penangkapan ikan, sehingga dapat diketahui potensi kerugian negara seperti : banyak hasil pemanfaatan usaha-usaha illegal tanpa izin, nilai pungutan usaha perikanan yang tidak sesuai dengan biaya pemulihan sumberdaya yang rusak dan seringnya terjadi penyalahgunaan izin penangkapan baik oleh usaha kecil maupun usaha besar.

Pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) adalah salah satu dari alat tangkap yang masuk dalam kategori alat penangkapan yang bersifat merusak lingkungan dan berdampak pada penurunan

sumberdaya ikan sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaannya.

Hal ini tertuang dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan RI. No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls)* dan pukat tarik (*seine nets)*, sudah diberlakukan sejak dulu walau baru dikeluarkan tahun 2015, karena aturan tersebut dikeluarkan oleh menteri kelautan dan perikanan RI sebagai amanah dari UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan junto UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Maka diperlukan pengelolaan perizinan yang tepat akurat dan terpercaya agar sumberdaya perikanan dapat diselamatkan dan dapat terus dimanfaatkan secara optimal.

7. Kemiskinan di Wilayah Pesisir

Perikanan Riau adalah perikanan rakyat, berciri khas modal dan tenaga yang terbatas serta peralatan yang sederhana. Dengan ciri khas yang demikian, daya saing mereka rendah dibanding dengan nelayan lainnya.

Situasi di perairan Riau menunjukkan kecenderungan menurunnya produksi ikan, yang dihasilkan para nelayan kecil sejak adanya IUU dan beroperasinya armada-armada perikanan yang menggunakan teknologi yang lebih modern, yang berasal dari dalam dan dari luar Provinsi Riau ataupun dari luar negeri.

Sementara itu, karena mata pencaharian mereka sebagai “pemburu ikan”, ketidakpastian produksi selalu besar. Dua hal tersebut mengakibatkan nelayan selalu tergantung dengan hubungan yang tidak seimbang antara “*patron”* dengan “*client”,* yang pada akhirnya berdampak sosial dan berdampak secara ekonomi. Secara sosial akses penangkapan ikan dikuasi oleh “*nelayan darat”* (*patroen),* dan akan berdampak secara ekonomi, yakni rendahnya pendapatan “*nelayan laut”* (*client).*

8. Ketahanan dan Keamanan Pangan Komoditas Produk Hasil Perikanan

Ikan merupakan salah satu sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena kandungan proteinnya tinggi, mengandung asam amino esensial, nilai biologisnya tinggi dan harganya relatif murah bila dibandingkan dengan sumber protein lainnya.

Masalahnya adalah ikan memiliki kelemahan karena cepat mengalami pembusukan maka perlu dilakukan penanganan,pengolahan dan pengawetan hasil perikanan yang bertujuan selain mencegah kerusakan ikan sehingga dapat memperpanjang daya simpan juga untuk menganekaragamkan produk olahan hasil perikanan.

Masih dilakukannya penanganan dan perlakuan produk hasil perikanan yang tidak mengikuti kaidah ketahanan dan keamanan pangan komoditas produk hasil perikanan, seperti pemakaian bahan berbahaya formalin dan pestisida pada aktivitas pengolahan pangan hasil perikanan dan pemakaian zat kimia berbahaya lainnya sebagai bahan tambahan pada pembuatan *pelet,* pakan ikan.

Pada sisi lain, dalam perdagangan hasil-hasil perikanan, persyaratan mutu telah ditentukan oleh negara pengimpor seperti jepang, Uni Eropa dan USA. Persyaratan tersebut terkait dengan jaminan mutu dan keamanan pangan hasil kelauatan dan perikanan. Produk hasil perikanan harus bebas dari pestisida, formalin dan khususnya antibiotik, menjadi permasalahan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat, khususnya dalam peningkatan ekspor hasil-hasil perikanan.

Selanjutnya, pembinaan kepada pembudidaya ikan melalui penerapan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB), bebas dari bakteri masih tergolong kompeten di daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengendalian jaminan mutu produk, dan perlunya meningkatkan jangkauan pelayanan dari pasar hygienis.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2017 merupakan tahun keempat jabatan GUBERNUR Riau periode 2014 – 2019. Pembangunan di provinsi riau pada tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen awal RPJMD yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah direview, memiliki 11 program dan 48 kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel T.VI.C.7.

Tabel T-VI.C.7

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Provinsi Riau

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam				**3.300.000.000**					**3.300.000.000**
1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Kab. Rokan Hilir, Kab. Kep. Merabti, Kab. Indragiri Hilir	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang mengalami kerusakan/degradasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove di wilayah pesisir	50 ha, 1.500 meter	3.300.000.000	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Kab. Rokan Hilir, Kab. Kep. Merabti, Kab. Indragiri Hilir	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang mengalami kerusakan/degradasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove di wilayah pesisir	50 ha, 1.500 meter	3.300.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**2.133.350.000**					**2.133.350.000**
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPT	Jumlah rekening	108 rekening	680.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPT	Jumlah rekening	108 rekening	680.400.000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah tenaga kebersihan (orang)	95 orang	250.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah tenaga kebersihan (orang)	95 orang	250.000.000

4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	10 jenis	50.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	10 jenis	50.000.000
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jenis Barang yang dicetak dan dijilid	8 dan 11	60.850.000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jenis Barang yang dicetak dan dijilid	8 dan 11	60.850.000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (unit)	9 Unit	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (unit)	9 Unit	25.000.000
7	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	4 Unit	196.500.000	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	4 Unit	196.500.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	8 eksemplar	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	8 eksemplar	25.000.000
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (porsi)	4800 porsi	130.000.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (porsi)	4800 porsi	130.000.000
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pusat dan Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75 kali	500.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pusat dan Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75 kali	500.000.000
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah tenaga keamanan kantor (orang)	72 orang	165.600.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah tenaga keamanan kantor (orang)	72 orang	165.600.000

12	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah media informasi dan komunikasi (edisi)	2 edisi	50.000.000	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah media informasi dan komunikasi (edisi)	2 edisi	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**273.050.000**					**273.050.000**
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiRiau	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara (m2)	30 m2	87.450.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiRiau	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara (m2)	30 m2	87.450.000
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara (unit)	11 unit	85.600.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara (unit)	11 unit	85.600.000
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	6 unit	100.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	6 unit	100.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				**37.400.000**					**37.400.000**
16	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah fisik dan mental aparatur yang di bina (orang)	140 orang	37.400.000	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah fisik dan mental aparatur yang di bina (orang)	140 0rang	37.400.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				**665.191.000**					**665.191.000**
17	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang menghadiri Rapat dan Kesepakatan Hasil Rakor	12 dan 10	105.290.000	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang menghadiri Rapat dan Kesepakatan Hasil Rakor	12 dan 10	105.290.000

18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen) dan Frekuensi Monev	12 dan 30	298.701.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen) dan Frekuensi Monev	12 dan 30	298.701.000
19	Supervisi dan statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah laporan	1 laporan	50.000.000	Supervisi dan statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah laporan	1 Laporan	50.000.000
20	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah pengelola administrasi keuangan (orang)	9 orang	211.200.000	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah pengelola administrasi keuangan (orang)	9 orang	211.200.000
	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut				**672.327.800**					**672.327.800**
21	Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS	11 Kab/kota	Jumlah POKMASWAS yang dibina dan dinilai	30 kelompok	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS	11 Kab/kota	Jumlah POKMASWAS yang dibina dan dinilai	30 kelompok	100.000.000
22	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	7 Kab/kota	Jumlah Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu (Kali)	14 kali	316.000.000	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	7 Kab/kota	Jumlah Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu (Kali)	14 kali	316.000.000
23	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Kota Dumai	Jumlah kapal yang di pelihara(Unit)	1 unit	256.327.800	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Kota Dumai	Jumlah kapal yang di pelihara(Unit)	1 unit	256.327.800
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				**18.298.523.000**					**18.298.523.000**

24	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	BBIS Sei Tibun dan Dempond Kampar	Jumlah calon induk ikan unggul	25000 ekor benih	200.000.000	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	BBIS Sei Tibun dan Dempond Kampar	Jumlah calon induk ikan unggul	25000 ekor benih	200.000.000
25	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kuansing, Kampar, Pelalawan	Jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	15 orang	100.000.000	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kuansing, Kampar, Pelalawan	Jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	15 orang	100.000.000
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	BBIS Sei Tibun Kampar dan Rupat	Jumlah pengerjaan sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT. Pembenihan	2 paket	263.473.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	BBIS Sei Tibun Kampar dan Rupat	Jumlah pengerjaan sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT. Pembenihan	2 paket	263.473.000
27	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Pelalawan, Kuansing, Pekanbaru dan Inhil	Jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya(CBIB)/orang	50 unit	200.000.000	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Pelalawan, Kuansing, Pekanbaru dan Inhil	Jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya(CBIB)/orang	50 unit	200.000.000
28	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Rohil, Inhil, Dumai dan Meranti	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	46 paket	16.898.050.000	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Rohil, Inhil, Dumai dan Meranti	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	46 paket	16.898.050.000
29	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan	BBIS Sei Tibun. Dempond Kampar	Jumlah pelayanan UPT. Pembenihan dalam menunjang produksi benih (paket)	2 paket	637.000.000	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan	BBIS Sei Tibun. Dempond Kampar	Jumlah pelayanan UPT. Pembenihan dalam menunjang produksi benih (paket)	2 paket	637.000.000
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				**4.209.575.000**					**4.209.575.000**
30	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan	PPI Tanjung Samak	Dokumen operasional pelabuhan perikanan	1 dokumen	187.517.000	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan	PPI Tanjung Samak	Dokumen operasional pelabuhan perikanan	1 dokumen	187.517.000
31	Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap	Kab/Kota	Jumlah kapal dan alat tangkap Ikan untuk masyarakat nelayan	15 unit	3.672.058.000	Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap	Kab/Kota	Jumlah kapal dan alat tangkap Ikan untuk masyarakat nelayan	15 unit	3.672.058.000
32	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	7 Kab/Kota	Jumlah perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan (Surat izin)	50 izin	150.000.000	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	7 Kab/Kota	Jumlah perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan (Surat izin)	50 izin	150.000.000
33	Percepatan Kartu Nelayan	12 kab/Kota Se Provinsi Riau	Jumlah baru nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)	4.600 orang nelayan	200.000.000	Percepatan Kartu Nelayan		Jumlah baru nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)	4.600 orang nelayan	200.000.000

	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan				**3.003.900.000**					**3.003.900.000**
34	Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan	Kab. Rohul dan Kota Pekanbaru	Jumlah pengolah hasil perikanan yang terampil (orang)	60 Orang	75.000.000	Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan	Kab. Rohul dan Kota Pekanbaru	Jumlah pengolah hasil perikanan yang terampil (orang)	60 Orang	75.000.000
35	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan	Kab. Bengkalis, Kota Dumai dan Kab. Rohil	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	45 unit	300.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan	Kab. Bengkalis, Kota Dumai dan Kab. Rohil	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	45 unit	300.000.000
36	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	5 kab/kota	Jumlah sertifikat yang diberikan bagi UMKM engolahan hasil perikanan	5 usulan sertifikat	150.000.000	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	5 kab/kota	Jumlah sertifikat yang diberikan bagi UMKM engolahan hasil perikanan	5 usulan sertifikat	150.000.000
37	Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru, Surabaya, Batam	Jumlah keikutsertaan dalam pameran/bazar Produk pengolahan hasil perikanan (kali)	3 kali	400.000.000	Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru, Surabaya, Batam	Jumlah keikutsertaan dalam pameran/bazar Produk pengolahan hasil perikanan (kali)	3 kali	400.000.000
38	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru	Jumlah inovasi menu serba ikan	36 menu	500.000.000	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru	Jumlah inovasi menu serba ikan	36 menu	500.000.000
39	Lomba dan Penilaian UMKM Terbaik se Provinsi Riau	12 Kab/Kota	Jumlah UMKM yang memenuhi persyaratan lomba / penilaian terbaik	12 UMKM	97.000.000	Lomba dan Penilaian UMKM Terbaik se Provinsi Riau	12 Kab/Kota	Jumlah UMKM yang memenuhi persyaratan lomba / penilaian terbaik	12 UMKM	97.000.000
40	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Pekanbaru	Jumlah sosialisasi gemarikan (kali)	4 kali	400.000.000	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Pekanbaru	Jumlah sosialisasi gemarikan (kali)	4 kali	400.000.000
41	Pembinaan dan Pengawasan LPPMHP	12 kab/Kota	Pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan di Provinsi Riau (unit UMKM)	12 UPI (UMKM)	79.940.000	Pembinaan dan Pengawasan LPPMHP	12 kab/Kota	Pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan di Provinsi Riau (unit UMKM)	12 UPI (UMKM)	79.940.000
42	Pengujian Mutu LPPMHP	Provinsi Riau	Peningkatan sumber daya manusia LPPMHP, jumlah sampel yang diuji	25 orang, 100 sampel uji	551.960.000	Pengujian Mutu LPPMHP	Provinsi Riau	Peningkatan sumber daya manusia LPPMHP, jumlah sampel yang diuji	25 orang, 100 sampel uji	551.960.000
43	Peningkatan Pelayanan LPPMHP	LPPMHP Provinsi Riau, Dumai	Meningkatnya jumlah sarana prasarana, jumlah tenaga pelayanan LPPMHP	1 unit, 4 personel	200.000.000	Peningkatan Pelayanan LPPMHP	LPPMHP Provinsi Riau, Dumai	Meningkatnya jumlah sarana prasarana, jumlah tenaga pelayanan LPPMHP	1 unit, 4 personel	200.000.000
44	Pembinaan Produk Perikanan Nonkonsumsi	Pekanbaru	Jumlah pengolah hasil produk non konsumsi yang terampil	25 orang	250.000.000	Pembinaan Produk Perikanan Nonkonsumsi	Pekanbaru	Jumlah pengolah hasil produk non konsumsi yang terampil	25 orang	250.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan				**1.479.949.000**					**1.479.949.000**

45	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	7 Kab/Kota	Jumlah petambak yang terlatih (orang)	50 orang	493.359.000	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	7 Kab/Kota	Jumlah petambak yang terlatih (orang)	50 orang	493.359.000
46	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Pelatihan	Kab. Kep. Meranti	Jumlah sarana dan prasarana UPT. Pelatihan dalam mendukung operasional pelatihan (unit)	1 unit	423.090.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Pelatihan	Kab. Kep. Meranti	Jumlah sarana dan prasarana UPT. Pelatihan dalam mendukung operasional pelatihan (unit)	1 unit	423.090.000
47	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Kab. Kep. Meranti dan Kota Pekanbaru	Jumlah pelayanan operasionalUPT. Pelatihan dalam menunjang pelatihan	1 pelayanan	563.500.000	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Kab. Kep. Meranti dan Kota Pekanbaru	Jumlah pelayanan operasionalUPT. Pelatihan dalam menunjang pelatihan	1 pelayanan	563.500.000
					200.000.000					**200.000.000**
48	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan dan Perikanan	Kab/Kota	Jumlah pembinaan penyuluh dan pendamping dalam mendukung pengembangan Kelautan dan Perikanan (orang/kelompok)	4 orang/kelompok	200.000.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan dan Perikanan	Kab/Kota	Jumlah pembinaan penyuluh dan pendamping dalam mendukung pengembangan Kelautan dan Perikanan (orang/kelompok)	4 orang/kelompok	200.000.000
JUMLAH					**34.273.265.800**					**34.273.265.800**

Pekanbaru, Juni 2017

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

NIP. 19630512 199303 1 006

Dari tabel diketahui bahwa rancangan awal RKPD sama dengan hasil analisis kebutuhan. Beberapa program dan kegiatan yang telah dirumuskan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah tahun 2018 mencakup 2 urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan dengan program sebagai berikut :

I. Urusan Wajib

1. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

II. Urusan Pilihan

1. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
2. Program pengembangan budidaya perikanan
3. Program pengembangan perikanan tangkap
4. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
5. Program pengembangan sumber daya manusia perikanan dan kelautan
6. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan

Sedangkan program rutin perangkat daerah adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2018 telah melalui proses rapat koordinasi teknis bidang kelautan dan perikanan dengan kanbupaten/kota se provinsi Riau, forum konsultasi publik, Musrenbang Provinsi, forum perangkat daerah di Bappeda, serta usulan dari bidang-bidang dan unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Kegiatan kepada masyarakat berupa hibah dan banuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2018 mengacu pada peraturan Gubernur Riau Nomor 25 tahun 2016, berupa kelompok masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangan berupa keputusan kepala SKPD.

Pada tahun 2018 usulan APBD diusulkan melalui aplikasi E-planning, dan berdasarkan evauasi ternyata ada usulan program baru dan perubahan nomenkelatur program dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Riau, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tupoksi serta kesesuaian dengan renstra kementrian kelautan dan perikanan yang mendukung nawa cita melalui program kemaritiman, sehingga dinas kelautan dan perikanan provinsi Riau memiliki kegiatan yang layak masuk dalam Urusan wajib untuk program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Untuk mengetahui usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berada di kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel T-VI. C. 9. (terlampir). Dari tabel diketahhui bahwa terdapat 2 kabupaten yang tidak mengusulkan kegiatan yaitu kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Siak.

TABEL T. VI.C.9

Kajian Usulan dan Kegiatan dari Masyarakat

Provinsi Riau Tahun 2018

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	**(6)**
	URUSAN WAJIB				
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
KOTA PEKANBARU					
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Pekanbaru	Jumlah pembudidaya yang menerepkan teknologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/ orang	200.000.000	**50 unit**
B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**				
1.	Percepatan Kartu nelayan	Pekanbaru	Jumlah nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)	200.000.000	**4.600 orang nelayan yang memiliki kartu nelayan**

C.	**PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**				
1	Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru	Jumlah Pengolah hasil Perikanan yang terampil (orang)	75.000.000	**60 Orang Pengolah hasil perikanan**
2.	Pameran/bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran/Bazar Produk Pengolahan hasil perikanan (kali)	400.000.000	**3 Kali**
3.	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru	Jumlah Inovasi Menu serba ikan	500.000.000	**36 Menu**
4.	Lomba dan Penilaian UMKM terbaik se Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah UMKM yang memenuhi persyaratan lomba penilaian terbaik	97.000.000	**12 UMKM se Provinsi Riau**
5	Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan	Pekanbaru	Jumlah Sosialisasi Gemarikan (kali)	400.000.000	**4 kali sosialisasi gemarikan**
6.	Pembinaan Produk Perikanan Nonkonsumsi	Pekanbaru	Jumlah Pengolahan Hasil Produksi non konsumsi yang terampil	250.000.000	**25 orang**
KOTA DUMAI					

A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Dumai	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	16.898.050.000	**46 Paket**
B.	**PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan hasil perikanan	Dumai	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	300.000.000	**45 unit**
2	Peningkatan Pelayanan LPPMHP	Dumai	Meningkatnya jumlah sarana prasarana jumlah tenaga pelayanan LPPMHP	200.000.000	**1 Unit dan 4 personel**
C.	**PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT**				
1	Peningktan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Dumai	Jumlah kapal yang di pelihara (unit)	256.327.800	**1 unit**
KABUPATEN BENGKALIS					

A.	**PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan hasil perikanan	Bengkalis	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	300.000.000	**45 Unit**
B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	Bengkalis	Jumlah Pengerjaan sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT. Pembenihan	263.473.000	**2 Paket**
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR					
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Indragiri hilir	Jumlah pembudidaya yang menerepkan teknologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/ orang	200.000.000	**50 unit**
2	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Indragiri hilir	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	16.898.050.000	**46 Paket**

B.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**				
1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Indragiri hilir	Luas kawasan ekosistem pesisir yang mengalami kerusakan degrasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove diwilayah pesisir	3.300.000.000	**50 ha , 1.500 meter**
		KABUPATEN KAMPAR			
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Kampar	Jumlah Calon induk ikan unggul	200.000.000	**25000 ekor benih**
2	Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan lingkungan	Kampar	jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	100.000.000	**15 orang**
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	Kampar	Jumlah Pengerjaan sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT. Pembenihan	263.473.000	**2 Paket**

4	Peningkatan Pelayanan kinerja UPT pembenihan	Kampar	Jumlah Pelayanan UPT Pembenihan dalam menunjang produksi benih (paket)	637.000.000	**2 Paket**
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI					
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan lingkungan	Kuantan Singingi	jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	100.000.000	**15 orang**
2	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Kuantan Singingi	Jumlah pembudidaya yang menerepkan teknologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/ orang	200.000.000	**50 unit**
KABUPATEN PELALAWAN					
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan lingkungan	Kab. Pelalawan	jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	100.000.000	**15 orang**
2	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Kab. Pelalawan	Jumlah pembudidaya yang menerepkan teknologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/ orang	200.000.000	**50 unit**

		KABUPATEN ROKAN HILIR			
A.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**				
	Kegiatan :				
1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Rokan Hilir	Luas kawasan ekosistem pesisir yang mengalami kerusakan degrasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove diwilayah pesisir	3.300.000.000	**50 ha , 1.500 meter**
B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Rokan Hilir	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	16.898.050.000	**46 Paket**
C.	**PROGRAM OPTIMALISASI PEGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan	Rokan Hilir	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	300.000.000	**45 unit**
		KABUPATEN ROKAN HULU			

A.	**PROGRAM OPTIMALISASI PEGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN**				
1	Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan	Rokan Hulu	Jumlah Pengolah hasil perikanan yang terampil	75.000.000	**60 Orang**
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI					
A.	**Perlindungan dan Pengkayaan Sumberdaya Ikan**				
	Kegiatan :				
1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Kab.Meranti	Luas kawasan ekosistem pesisir yang mengalami kerusakan degrasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove diwilayah pesisir	30.000.000	**- Bantuan alat kemasan (Packaging) sebanyak 3 Unit**
B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Kab.Meranti	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	16.898.050.000	**- Revitalisasi Tambak sebanyak 4 Unit**
C.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**				

1	Peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan	Kab.Meranti	Dokumen operasional pelabuhan perikanan	187.517.000	**1**
D.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERIKANAN DAN KELAUTAN**				
1	Peningkatan Pelayanan kinerja UPT Pelatihan	Kab. Meranti	Jumlah Pelayanan Operasional UPT Pelatihan Dalam menunjang Pelatihan	563.500.000	**1**
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	Kab. Meranti	Jumlah sarana dan prasarana UPT Pelatihan dalam mendukung operasional pelatihan (unit)	423.090.000	**1**

Pekanbaru, Juni 2017

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

NIP. 19630512 199303 1 006

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, agenda pembangunan perikanan dan kelautan penjabaran operasionalnya dituangkan dalam 3 prioritas utama yakni: (1) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, (2) Meningkatkan Mutu Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan, dan (3) Meningkatkan Iklim Berusaha yang Kondusif.

a. Prioritas 1 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Riau dilakukan melalui pengembangan usaha perikanan budidaya, khususnya budidaya perikanan air tawar melalui pengembangan kawasan sentra-sentra produksi. Pengembangan perikanan tangkap di laut dan perairan pantai maupun di perairan umum, saatnya untuk dibatasi. Kegiatan pengembangan untuk bidang tersebut adalah pengembangan nilai tambah produk hasil perikanan.

b. Prioritas 2 : Meningkatkan Mutu Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan : Meningkatkan Mutu Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang hygienis, peningkatan daya saing produk perikanan dan kelautan, peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya perikanan.

c. Prioritas 3 : Meningkatkan Iklim Berusaha yang Kondusif.

Iklim usaha yang kondusif dengan sendirinya akan tercipta jika adanya keamanan usaha, sarana produksi tersedia dan harga terjangkau, harga penjualan hasil usaha menguntungkan, tersedia modal kerja dan adanya dukungan perbankan. Berusaha yang kondusif sangat terkait dengan sistem aquabisnis yang diterapkan pelaku usaha. Pemahaman pelaku usaha dengan komoditas yang *"laku"* di pasar merupakan modal awal untuk meningkatkan iklim berusaha yang kondusif.

Di samping 3 prioritas tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan

terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, yakni Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan; Lintas Bidang Perubahan Iklim Global dan Lintas Bidang Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan.

Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konstribusi kelautan dan perikanan pada PDB daerah, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah :

1. Pro poor

Pendekatan *Pro-poor* dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2. Pro job

Pendekatan *Pro-job* dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.

3. Pro growth

Pendekatan *Pro-growth* dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan sebagai pilar ketahanan ekonomi melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku aquabisnis, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur.

4. Pro sustainability

Pendekatan *pro-sustainability* dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah kebijakan di atas dilakukan melalui:

1. Pengembangan Kawasan Kampung Perikanan

Kawasan Kampung Perikanan (Minapolitan) merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

Pengembangan Kawasan Kampung Perikanan bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, (ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan Kawasan Kampung Perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Adapun sasaran pengembangan Kawasan Kampung Perikanan adalah sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi daerah.

Pendekatan pengembangan Kampung Perikanan dilakukan melalui :

a. Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Berbasis Wilayah.
   Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan

b. Kawasan Ekonomi Unggulan.

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

c. Sentra Produksi

Kawasan Kampung Perikanan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.

d. Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

e. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan Kawasan Kampung Perikanan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.

f. Lintas Sektor

Kawasan Kampung Perikanan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasara produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengembangkan Kawasan Kampung Perikanan antara lain:

- Pembangunan sarana dan prasarana perikanan pada kawasan pengembangan kawasan budidaya, memenuhi kebutuhan benih ikan, Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan.

- Pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan yang mampu menyalurkan dana pembiayaan melalui program KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank).
- Peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) pada usaha di perikanan budidaya, dan usaha pengolahan dan pemasaran.

2. Entreprenuership

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (*entrepreneurship*) dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan (*trust building*) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa *entrepreneurship* para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Strategi *entrepreneurship* akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam berproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas.

Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang masih menganggur. Kegiatan yang dilakukan adalah pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, swasta maupun dari pemerintah melalui dana APBD. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemuda, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau memiliki UPT yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan teknis/magang budidaya perikanan seperti UPBAT Rumbai, UPBAL Sei Suir, BBIS Sei Tibun dan Dempond Kampar. Sementara untuk pengolahan ikan dapat digunakan Sentra Produksi Pengolahan Ikan Koto Mesjid.

3. Networking

Setiap individu, institusi, dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih terlihat indikasi bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri. Keadaan tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan menfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan *networking*, baik secara internal antar bidang di lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, antara provinsi-kabupaten/kota, antar daerah kabupaten-kota, antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau.

Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan yang dimiliki.

4. Technology and Innovation

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim.

Kegiatan adaptasi teknologi, uji terap lapangan dan pengembangan penelitian dilakukan untuk menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan

bertanggung jawab.

5. Empowering

Kemiskinan merupakan permasalahan nelayan dan pembudidaya ikan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan mayarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal.

Pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dalam jangka panjang diarahkan untuk (i) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia partisipasi mayarakat, penguatan modal dan pengutan kelembagaan masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (iii) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen Dinas Perikanan dan Kelautan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan antara lain pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan sumber daya ikan, pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan (i) identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumber

daya kelautan dan perikanan yang ada dalam rangka menyusun perencanaan pengelolaannya berbasis desa (ii) melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat, (iii) meningkatkan kapasitas aparatur sebagai pengelola di wilayahnya, (iv) memperbaiki kualitas masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan peningkatan kapasitas usaha, (v) memanfaatkan secara optimal kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dibentuk oleh berbagai program sebelumnya atau membentuk kelompok masyarakat baru, (vi) mengoptimalkan peran tenaga pendamping sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan di tingkat desa serta melakukan sosialisasi, serta (vii) menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dn berkelanjutan dengan pola *bottom up* sehigga jenis kegiatan yang dilaksanakan merupakan aspirasi kelompok masyarakat di wilayahnya.

6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi.

Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Mayarakat) pengelola terumbu karang. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan. Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor andalan

yang potensil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan ikan pada pasar nasional maupun pasar global dari tahun tahun cenderung menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin banyaknya permasalahan penyakit pada komoditas selain ikan terutama pada komoditas ternak (Flu babi, Flu burung, Sapi gila dan sebagainya).

Dampaknya, terjadi pergeseran kebiasaan lokal khususnya pada masyarakat Eropa, Amerika dan Jepang dan negara maju lainnya, bahwa masyarakat maju tersebut mengutamakan mengkonsumsi protein berasal dari ikan.

Untuk meraih peluang tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah mencanangkan gerakan *"The Blue Revolution Polices"* . Sasarannya, pada tahun 2015, Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar dengan target peningkatan produksi perikanan sebesar 353 %.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau 2016

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan dan kelautan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pada Sekertariat, bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang kelautan dan pengawasan, dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekertariat, bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang kelautan dan pengawasan, dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekertariat, bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang kelautan dan pengawasan, dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekertariat, bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang kelautan dan pengawasan, dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Merujuk visi dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan mengemban tugas mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing melalui visi :

"*Terwujudnya Perikanan Dan Kelautan Riau Yang Tangguh Serta Lestari Tahun 2020*"

Pengertian dari kata kunci pada visi diatas adalah :

1. **Perikanan dan kelautan yang berdaya saing**, berarti produk perikanan dan kelautan mampu menghasilkan produk perikanan dan kelautan, yang kontinyu, berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif.
2. **Perikanan dan kelautan yang berkelanjutan**, artinya produk perikanan dan kelautan mampu bertahan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dengan menggunakan sumber daya terbarukan.
3. **Kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan,** artinya nelayan dan pembudidaya ikan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan mampu memenuhi kewajibannya sebagai mahluk sosialnya.

Dengan berjalannya dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Riau tahun 2014 – 2019 maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Provinsi Riau tahun 2018 mengacu pada prioritas pembangunan Provinsi Riau seperti yang tertera pada Misi Pembangunan Perikanan dan Kelautan yang merupakan prioritas pembangunan Provinsi Riau dan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan perangkat daerah seperti 1) kerusakan lingkungan, bencana dan dampak perubahan iklim, 2) penurunan potensi sumberdaya ikan (SDI), 3) pengawasan sumberdaya ikan belum optimal, 4) keterbatasan sarana dan prasarana perikanan, 5) konflik antar nelayan dan tindak pidana perikanan, 6) gerakan Nasional penyelamatan sumberdaya alam, 7) kemiskinan di wilayah pesisir, dan 8) ketahanan dan kaeamanan pangan komoditas produk hasil perikanan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Pelaku Perikanan dan Kelautan,
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan,
3. Meningkatkan Mutu Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan,
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan,
5. Meningkatkan Iklim Berusaha yang Kondusif, Lapangan Kerja yang Produktif, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Perikanan sekaligus meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan,
6. Meningkatkan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawas Sumber daya Perikanan dan Kelautan,
7. Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perikanan dan Kelautan, dan
8. Meningkatkan Kerjasama antar Provinsi, Kabupaten/Kota.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Perikanan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau untuk mencapai dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks)

bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2018 pada perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017 dalam aspek perencanaan, dengan mempertimbangkan komitmen gubernur dan wakil guberunur, tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019 sebagai berikut :

"**terwujudnya provinsi riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur"**

Dalam mencapai sasaran strategis ini dana yang dibutuhkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 34.273.265.800,00 dengan perkiraan maju untuk tahun 2019 sebesar Rp. 19.549.800.000,00 Untuk tahun 2018 terdapat 11 Program prioritas pembangunan dengan 48 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
    a. Konservasi kawasan Ekosistem Mangrove
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan Listrik
    b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
    c. Penyediaan alat tulis kantor
    d. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
    e. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
    f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    g. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
    h. Penyediaan Makanan dan Minuman
    i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
    j. Penyediaan jasa keamanan kantor
    k. Penyediaan jasa Sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a. Pemeliharan Rutin/berkala gedung kantor
   b. Pemeliharan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   c. Pemeliharan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a.Pembinaan fisi dan mental aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   a.Rapat koordinasi pada setiap SKPD
   b.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
   c.Supervisi dan Statistik
   d.Penyediaan jasa pengelolaan Administrasi Keuangan
6. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
   a. Pebinaan dan Pemberdayaan serta penilaian POKMASWAS
   b. gelar Operasi dan pengawasan terpadu
   c. peningkatan pelayanan dan pemeliharaan kapal pengawas
7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
   a. pengembangan bibit ikan unggul
   d. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan
   e. peningkatan sarana dan prasarana UPT pembenihan perikanan
   f. pengembangan teknologi anjuran perikanan budidaya
   g. pengembangan prasarana dan sarana perikanan budidaya
   h. peningkatan pelayanan kinerja UPT pembenihan
8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
   a. peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan
   b. pengadaan kapal dan alat tangkap ikan
   c. pengelolaan perizinan perikanan tangkap di provinsi riau
   d. percepatan kartu nelayan
9. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
   a. pengembangan nilai produk pengolahan hasil perikanan
   b. Pengembangan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan hasil perikanan

c. pembinaan dan pelayanan kelengkapan sertifikatpendukung bagi UMKM pengolahan hasil perikanan

d. pameran/bazar produk pengolahan hasil perikanan

f. lomba dan penilaian UMKM terbaik se Provinsi Riau

g. gerakan masyarakat makan ikan

h. pembinaan dan pengawasan LPPMHP

i. pengujian mutu LPPMHP

j. Peningkatan layanan LPPMHP

k. pembinaan produk perikanan non konsumsi

10. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan

    a. Pelatihan Penerapan Teknologi perikanan budidaya air payau

    b. peningkatan sarana dan prasarana UPT pelatihan

    c. peningkatan pelayanan kinerja UPT pelatihan perikanan

11. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan

    a. peningkatan sumberdaya manusia penyuluh dan pendamping kelautan dan perikanan

Untuk mengetahui rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2018 dan perkiraan maju tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel T-VI. C. 10 berikut.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Riau Tahun 2018 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2018 yang tidak lepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih terarah dan terkoordinasi sehingga menghasilkan rencana kerja yang lebih baik .

Tahun 2018, anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau lebih fokus pada capaian Indikator Kinerja Utama. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan antara lain dengan meningkatkan produksi perikanan sebesar 260.776,47 yang terdiri dari produksi perikanan tangkap yaitu 135.603,00 ton, produksi perikanan budidaya 125.173,47 ton, meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105,10., meningkatkan Nilai Tukar pembudidaya ikan (NTPi) 104,50 dan meningkatnya konsumsi ikan per kapita 42,18 kg/kapita/Tahun.

Demikian beberapa indikator yang akan dicapai dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yang akan dilaksanakann pada tahun 2018.

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator
(1)	(2)	(3)
	BELANJA DAERAH	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
	BELANJA LANGSUNG	
I	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**	**Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam luas kawasaan konservasi perairan daerah yang dibina**
1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang mengalami kerusakan/degradasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove di wilayah pesisir
II	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan (orang)
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
4	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jenis Barang yang dicetak dan dijilid
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (unit)
6	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-u ndangan yang disediakan (eksemplar)
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (porsi)
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (orang)
11	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Jumlah media informasi dan komunikasi (edisi)
III	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja**
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara (m2)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara (unit)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)
IV	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur**
1	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah fisik dan mental aparatur yang di bina (orang)
V	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Persentase ketepatan penyampaian laporan**
1	Rapat Koordinasi Setiap SKPD	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengikuti Rapat dan Kesepakatan Hasil Rakor
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen) dan Frekuensi Monev
3	Supervisi dan statistik	Jumlah laporan
4	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan (orang)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator
(1)	(2)	(3)
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT**	**Berkurangnya IUU Fishing**
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS	Jumlah POKMASWA S yang dibina dan dinilai
2	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	Jumlah Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu (Kali)
3	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Jumlah Kapal Yang di Pelihara (Unit)
VII	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**	**Jumlah produksi hasil Perikanan Budidaya**
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah calon induk ikan unggul
2	Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah pembudidaya yang dapat mengendalika n kesehatan ikan dan lingkungan
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	Jumlah pengerjaan srana dan prasarana dalam menunjang beroperasiny a UPT. Pembenihan
4	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/orang
5	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)
6	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan	Jumlah pelayanan UPT. Pembenihan dalam menunjang produksi Benih (paket)
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**	**Meningkatnya hasil tangkapan perairan laut**
1	Peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan	Dokumen operasional pelabuhan perikanan
2	Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap	Jumlah Kapal dan Alat Tangkap Ikan untuk Masyarakat Nelayan
3	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	Jumlah Perizinan Perikanan Tangkap yang diterbitkan (Surat izin)
4	Percepatan Kartu Nelayan	Jumlah nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)
IX	**PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**	**Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan fasilitasi pemasaran Nilai ekspor produk perikanan**
1	Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan yang Terampil (orang)
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin (unit)
3	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Sertifikat yang diberikan bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan
4	Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran/Baz ar Produk Pengolahan Hasil Perikanan (kali)
5	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Inovasi Menu Serba Ikan
6	Lomba dan Penilaian UMKM Terbaik se-Provinsi Riau	Jumlah UMKM yang memenuhi Persyaratan Lomba / Penilaian Terbaik
7	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah Sosialisasi Gemarikan (kali)
8	Pembinaan dan Pengawasan LPPMHP	Tercapainya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Provinsi Riau (unit UMKM)
9	Pengujian Mutu LPPMHP	Peningkatan sumber daya manusia LPPMHP; Jumlah sampel yang diuji
10	Peningkatan Pelayanan LPPMHP	Meningkatny a jumlah sarana prasarana; jumlah tenaga pelayanan LPPMHP
11	Pembinaan Produk Perikanan Non Konsumsi	Jumlah Pengolah Hasil Produk Non Konsumsi yang Terampil

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator
(1)	(2)	(3)
X	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**Peningkatan Jumlah SDM bidang perikanan dan kelautan yang bersertifikat (CPIP dan CBIB)**
1	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	Jumlah Petambak yang Terlatih (Orang)
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan dalam mendukung Operasional Pelatihan (Unit)
3	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Jumlah Pelayanan Operasional UPT Pelatihan Dalam Menunjang Pelatihan
XI	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN**	**Terwujudnya pengembangan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, SDM penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan**
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pembinaan Penyuluh dan Pendamping dalam mendukung pengembang an Kelautan dan Perikanan (orang/kelompok)

Pekanbaru, Juni 2017
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si
NIP. 19630512 199303 1 006

Tabel. T-VI.C.1
Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					Tahun 2015 (tahun n-2)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	Tahun 2015 (tahun n-2)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	0	0	133.209,00	132.261,00	134.261,00	135.603,00	107.233,59	129,384.10 *	134.261,00	135.603,00
2	Jumlah Produksi Perikanan Budiaya	Ton	0	0	123.471,75	100.787,52	111.762,02	125.173,47	106.233,10	90,378.08 *	111.762,02	125.173,47
5	Meningkatnya Konsumsi Ikan Per Kapita	Kg/Kapita/Thn	0	0	41,00	42,00	42,06	42,18	41,10	40.00 *	42,06	42,18
9	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Ha	0	0	26,00	34,00	42,00	50,00	175,00	23.491,32	42,00	50,00
11	Jumlah Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan yang dilatih	Orang	0	0	98,00	350,00	539,00	578,00	95,00	1.064,00	539,00	578,00

* Angka sementera sebelum divalidasi

Pekanbaru, Juni 2017
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si
NIP. 19630512 199303 1 006

Catatan Analisa
13

Tabel T-VI.C.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Perovinsi Riau

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam				**3.300.000.000**					**3.300.000.000**
1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Kab. Rokan Hilir, Kab. Kep. Merabti, Kab. Indragiri Hilir	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang mengalami kerusakan/degradasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove di wilayah pesisir	50 ha, 1.500 meter	3.300.000.000	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Kab. Rokan Hilir, Kab. Kep. Merabti, Kab. Indragiri Hilir	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang mengalami kerusakan/degradasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove di wilayah pesisir	50 ha, 1.500 meter	3.300.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**2.133.350.000**					**2.133.350.000**
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPT	Jumlah rekening	108 rekening	680.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPT	Jumlah rekening	108 rekening	680.400.000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah tenaga kebersihan (orang)	95 orang	250.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah tenaga kebersihan (orang)	95 orang	250.000.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	10 jenis	50.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	10 jenis	50.000.000
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jenis Barang yang dicetak dan dijilid	8 dan 11	60.850.000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jenis Barang yang dicetak dan dijilid	8 dan 11	60.850.000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (unit)	9 Unit	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (unit)	9 Unit	25.000.000
7	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	4 Unit	196.500.000	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	4 Unit	196.500.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	8 eksemplar	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	8 eksemplar	25.000.000
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (porsi)	4800 porsi	130.000.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (porsi)	4800 porsi	130.000.000
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pusat dan Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75 kali	500.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pusat dan Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75 kali	500.000.000
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah tenaga keamanan kantor (orang)	72 orang	165.600.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah tenaga keamanan kantor (orang)	72 orang	165.600.000
12	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah media informasi dan komunikasi (edisi)	2 edisi	50.000.000	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah media informasi dan komunikasi (edisi)	2 edisi	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**273.050.000**					**273.050.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara (m2)	30 m2	87.450.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara (m2)	30 m2	87.450.000
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara (unit)	11 unit	85.600.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara (unit)	11 unit	85.600.000
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	6 unit	100.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	6 unit	100.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				**37.400.000**					**37.400.000**
16	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah fisik dan mental aparatur yang di bina (orang)	140 orang	37.400.000	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah fisik dan mental aparatur yang di bina (orang)	140 0rang	37.400.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				**665.191.000**					**665.191.000**
17	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang menghadiri Rapat dan Kesepakatan Hasil Rakor	12 dan 10	105.290.000	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang menghadiri Rapat dan Kesepakatan Hasil Rakor	12 dan 10	105.290.000
18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen) dan Frekuensi Monev	12 dan 30	298.701.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen) dan Frekuensi Monev	12 dan 30	298.701.000
19	Supervisi dan statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah laporan	1 laporan	50.000.000	Supervisi dan statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah laporan	1 Laporan	50.000.000
20	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah pengelola administrasi keuangan (orang)	9 orang	211.200.000	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Jumlah pengelola administrasi keuangan (orang)	9 orang	211.200.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut				**672.327.800**					**672.327.800**
21	Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS	11 Kab/kota	Jumlah POKMASWAS yang dibina dan dinilai	30 kelompok	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS	11 Kab/kota	Jumlah POKMASWAS yang dibina dan dinilai	30 kelompok	100.000.000
22	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	7 Kab/kota	Jumlah Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu (Kali)	14 kali	316.000.000	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	7 Kab/kota	Jumlah Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu (Kali)	14 kali	316.000.000
23	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Kota Dumai	Jumlah kapal yang di pelihara(Unit)	1 unit	256.327.800	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Kota Dumai	Jumlah kapal yang di pelihara(Unit)	1 unit	256.327.800
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				**18.298.523.000**					**18.298.523.000**
24	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	BBIS Sei Tibun dan Dempond Kampar	Jumlah calon induk ikan unggul	25000 ekor benih	200.000.000	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	BBIS Sei Tibun dan Dempond Kampar	Jumlah calon induk ikan unggul	25000 ekor benih	200.000.000
25	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kuansing, Kampar, Pelalawan	Jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	15 orang	100.000.000	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kuansing, Kampar, Pelalawan	Jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	15 orang	100.000.000
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	BBIS Sei Tibun Kampar dan Rupat	Jumlah pengerjaan sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT. Pembenihan	2 paket	263.473.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	BBIS Sei Tibun Kampar dan Rupat	Jumlah pengerjaan sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT. Pembenihan	2 paket	263.473.000
27	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Pelalawan, Kuansing, Pekanbaru dan Inhil	Jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya(CBIB)/orang	50 unit	200.000.000	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Pelalawan, Kuansing, Pekanbaru dan Inhil	Jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya(CBIB)/orang	50 unit	200.000.000
28	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Rohil, Inhil, Dumai dan Meranti	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	46 paket	16.898.050.000	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Rohil, Inhil, Dumai dan Meranti	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	46 paket	16.898.050.000
29	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan	BBIS Sei Tibun. Dempond Kampar	Jumlah pelayanan UPT. Pembenihan dalam menunjang produksi benih (paket)	2 paket	637.000.000	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan	BBIS Sei Tibun. Dempond Kampar	Jumlah pelayanan UPT. Pembenihan dalam menunjang produksi benih (paket)	2 paket	637.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				**4.209.575.000**					**4.209.575.000**
30	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan	PPI Tanjung Samak	Dokumen operasional pelabuhan perikanan	1 dokumen	187.517.000	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan	PPI Tanjung Samak	Dokumen operasional pelabuhan perikanan	1 dokumen	187.517.000
31	Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap	Kab/Kota	Jumlah kapal dan alat tangkap Ikan untuk masyarakat nelayan	15 unit	3.672.058.000	Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap	Kab/Kota	Jumlah kapal dan alat tangkap Ikan untuk masyarakat nelayan	15 unit	3.672.058.000
32	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	7 Kab/Kota	Jumlah perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan (Surat izin)	50 izin	150.000.000	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	7 Kab/Kota	Jumlah perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan (Surat izin)	50 izin	150.000.000
33	Percepatan Kartu Nelayan	12 kab/Kota Se Provinsi Riau	Jumlah baru nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)	4.600 orang nelayan	200.000.000	Percepatan Kartu Nelayan		Jumlah baru nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)	4.600 orang nelayan	200.000.000
	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan				**3.003.900.000**					**3.003.900.000**
34	Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan	Kab. Rohul dan Kota Pekanbaru	Jumlah pengolah hasil perikanan yang terampil (orang)	60 Orang	75.000.000	Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan	Kab. Rohul dan Kota Pekanbaru	Jumlah pengolah hasil perikanan yang terampil (orang)	60 Orang	75.000.000
35	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan	Kab. Bengkalis, Kota Dumai dan Kab. Rohil	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	45 unit	300.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan	Kab. Bengkalis, Kota Dumai dan Kab. Rohil	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	45 unit	300.000.000
36	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	5 kab/kota	Jumlah sertifikat yang diberikan bagi UMKM engolahan hasil perikanan	5 usulan sertifikat	150.000.000	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	5 kab/kota	Jumlah sertifikat yang diberikan bagi UMKM engolahan hasil perikanan	5 usulan sertifikat	150.000.000
37	Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru, Surabaya, Batam	Jumlah keikutsertaan dalam pameran/bazar Produk pengolahan hasil perikanan (kali)	3 kali	400.000.000	Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru, Surabaya, Batam	Jumlah keikutsertaan dalam pameran/bazar Produk pengolahan hasil perikanan (kali)	3 kali	400.000.000
38	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru	Jumlah inovasi menu serba ikan	36 menu	500.000.000	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru	Jumlah inovasi menu serba ikan	36 menu	500.000.000
39	Lomba dan Penilaian UMKM Terbaik se Provinsi Riau	12 Kab/Kota	Jumlah UMKM yang memenuhi persyaratan lomba / penilaian terbaik	12 UMKM	97.000.000	Lomba dan Penilaian UMKM Terbaik se Provinsi Riau	12 Kab/Kota	Jumlah UMKM yang memenuhi persyaratan lomba / penilaian terbaik	12 UMKM	97.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
40	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Pekanbaru	Jumlah sosialisasi gemarikan (kali)	4 kali	400.000.000	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Pekanbaru	Jumlah sosialisasi gemarikan (kali)	4 kali	400.000.000
41	Pembinaan dan Pengawasan LPPMHP	12 kab/Kota	Pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan di Provinsi Riau (unit UMKM)	12 UPI (UMKM)	79.940.000	Pembinaan dan Pengawasan LPPMHP	12 kab/Kota	Pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan di Provinsi Riau (unit UMKM)	12 UPI (UMKM)	79.940.000
42	Pengujian Mutu LPPMHP	Provinsi Riau	Peningkatan sumber daya manusia LPPMHP, jumlah sampel yang diuji	25 orang, 100 sampel uji	551.960.000	Pengujian Mutu LPPMHP	Provinsi Riau	Peningkatan sumber daya manusia LPPMHP, jumlah sampel yang diuji	25 orang, 100 sampel uji	551.960.000
43	Peningkatan Pelayanan LPPMHP	LPPMHP Provinsi Riau, Dumai	Meningkatnya jumlah sarana prasarana, jumlah tenaga pelayanan LPPMHP	1 unit, 4 personel	200.000.000	Peningkatan Pelayanan LPPMHP	LPPMHP Provinsi Riau, Dumai	Meningkatnya jumlah sarana prasarana, jumlah tenaga pelayanan LPPMHP	1 unit, 4 personel	200.000.000
44	Pembinaan Produk Perikanan Nonkonsumsi	Pekanbaru	Jumlah pengolah hasil produk non konsumsi yang terampil	25 orang	250.000.000	Pembinaan Produk Perikanan Nonkonsumsi	Pekanbaru	Jumlah pengolah hasil produk non konsumsi yang terampil	25 orang	250.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan				**1.479.949.000**					**1.479.949.000**
45	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	7 Kab/Kota	Jumlah petambak yang terlatih (orang)	50 orang	493.359.000	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	7 Kab/Kota	Jumlah petambak yang terlatih (orang)	50 orang	493.359.000
46	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Pelatihan	Kab. Kep. Meranti	Jumlah sarana dan prasarana UPT. Pelatihan dalam mendukung operasional pelatihan (unit)	1 unit	423.090.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Pelatihan	Kab. Kep. Meranti	Jumlah sarana dan prasarana UPT. Pelatihan dalam mendukung operasional pelatihan (unit)	1 unit	423.090.000
47	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Kab. Kep. Meranti dan Kota Pekanbaru	Jumlah pelayanan operasionalUPT. Pelatihan dalam menunjang pelatihan	1 pelayanan	563.500.000	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Kab. Kep. Meranti dan Kota Pekanbaru	Jumlah pelayanan operasionalUPT. Pelatihan dalam menunjang pelatihan	1 pelayanan	563.500.000
					200.000.000					**200.000.000**
48	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan dan Perikanan	Kab/Kota	Jumlah pembinaan penyuluh dan pendamping dalam mendukung pengembangan Kelautan dan Perikanan (orang/kelompok)	4 orang/kelompok	200.000.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan dan Perikanan	Kab/Kota	Jumlah pembinaan penyuluh dan pendamping dalam mendukung pengembangan Kelautan dan Perikanan (orang/kelompok)	4 orang/kelompok	200.000.000
JUMLAH					**34.273.265.800**					**34.273.265.800**

Pekanbaru, Juni 2017

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

NIP. 19651002 199403 1 006

Catatan Penting
(12)

Catatan Penting

Catatan Penting

Catatan Penting

Catatan Penting

TABEL T.-VI.C.9
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi Riau
Tahun 2018

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	**(6)**
	URUSAN WAJIB				
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		KOTA PEKANBARU			
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Pekanbaru	Jumlah pembudidaya yang menerepkan teknologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/ orang	200.000.000	**50 unit**
B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**				
1.	Percepatan Kartu nelayan	Pekanbaru	Jumlah nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)	200.000.000	**4.600 orang nelayan yang memiliki kartu nelayan**
C.	**PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**				
1	Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru	Jumlah Pengolah hasil Perikanan yang terampil (orang)	75.000.000	**60 Orang Pengolah hasil perikanan**
2.	Pameran/bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran/Bazar Produk Pengolahan hasil perikanan (kali)	400.000.000	**3 Kali**
3.	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Pekanbaru	Jumlah Inovasi Menu serba ikan	500.000.000	**36 Menu**
4.	Lomba dan Penilaian UMKM terbaik se Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah UMKM yang memenuhi persyaratan lomba penilaian terbaik	97.000.000	**12 UMKM se Provinsi Riau**

5	Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan	Pekanbaru	Jumlah Sosialisasi Gemarikan (kali)	400.000.000	**4 kali sosialisasi gemarikan**
6.	Pembinaan Produk Perikanan Nonkonsumsi	Pekanbaru	Jumlah Pengolahan Hasil Produksi non konsumsi yang terampil	250.000.000	**25 orang**
		KOTA DUMAI			
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Dumai	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	16.898.050.000	**46 Paket**
B.	**PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan hasil perikanan	Dumai	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	300.000.000	**45 unit**
2	Peningkatan Pelayanan LPPMHP	Dumai	Meningkatnya jumlah sarana prasarana jumlah tenaga pelayanan LPPMHP	200.000.000	**1 Unit dan 4 personel**
C.	**PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT**				
1	Peningktan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Dumai	Jumlah kapal yang di pelihara (unit)	256.327.800	**1 unit**
		KABUPATEN BENGKALIS			
A.	**PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan hasil perikanan	Bengkalis	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	300.000.000	**45 Unit**

B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	Bengkalis	Jumlah Pengerjaan sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT. Pembenihan	263.473.000	**2 Paket**
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR					
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Indragiri hilir	Jumlah pembudidaya yang menerepkan teknologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/ orang	200.000.000	**50 unit**
2	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Indragiri hilir	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	16.898.050.000	**46 Paket**
B.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**				
1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Indragiri hilir	Luas kawasan ekosistem pesisir yang mengalami kerusakan degrasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove diwilayah pesisir	3.300.000.000	**50 ha , 1.500 meter**
KABUPATEN KAMPAR					
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Kampar	Jumlah Calon induk ikan unggul	200.000.000	**25000 ekor benih**
2	Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan lingkungan	Kampar	jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	100.000.000	**15 orang**
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	Kampar	Jumlah Pengerjaan sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT. Pembenihan	263.473.000	**2 Paket**
4	Peningkatan Pelayanan kinerja UPT pembenihan	Kampar	Jumlah Pelayanan UPT Pembenihan dalam menunjang produksi benih (paket)	637.000.000	**2 Paket**

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI					
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan lingkungan	Kuantan Singingi	jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	100.000.000	**15 orang**
2	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Kuantan Singingi	Jumlah pembudidaya yang menerepkan teknologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/ orang	200.000.000	**50 unit**
KABUPATEN PELALAWAN					
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan lingkungan	Kab. Pelalawan	jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	100.000.000	**15 orang**
2	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Kab. Pelalawan	Jumlah pembudidaya yang menerepkan teknologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/ orang	200.000.000	**50 unit**
KABUPATEN ROKAN HILIR					
A.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**				
	Kegiatan :				
1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Rokan Hilir	Luas kawasan ekosistem pesisir yang mengalami kerusakan degrasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove diwilayah pesisir	3.300.000.000	**50 ha , 1.500 meter**
B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Rokan Hilir	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	16.898.050.000	**46 Paket**
C.	**PROGRAM OPTIMALISASI PEGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN**				
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan	Rokan Hilir	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	300.000.000	**45 unit**

		KABUPATEN ROKAN HULU			
A.	**PROGRAM OPTIMALISASI PEGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN**				
1	Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan	Rokan Hulu	Jumlah Pengolah hasil perikanan yang terampil	75.000.000	**60 Orang**
		KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI			
A.	**Perlindungan dan Pengkayaan Sumberdaya Ikan**				
	Kegiatan :				
1	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Kab.Meranti	Luas kawasan ekosistem pesisir yang mengalami kerusakan degrasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove diwilayah pesisir	30.000.000	**- Bantuan alat kemasan (Packaging) sebanyak 3 Unit**
B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**				
1	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Kab.Meranti	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk	16.898.050.000	**- Revitalisasi Tambak sebanyak 4 Unit**
C.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**				
1	Peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan	Kab.Meranti	Dokumen operasional pelabuhan perikanan	187.517.000	**1**
D.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERIKANAN DAN KELAUTAN**				
1	Peningkatan Pelayanan kinerja UPT Pelatihan	Kab. Meranti	Jumlah Pelayanan Operasional UPT Pelatihan Dalam menunjang Pelatihan	563.500.000	**1**
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	Kab. Meranti	Jumlah sarana dan prasarana UPT Pelatihan dalam mendukung operasional pelatihan (unit)	423.090.000	**1**

Pekanbaru, Juni 2017

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

NIP. 19651002 199403 1 006

Tabel. T-VI.C.10
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Provinsi Riau

Nama SKPD : **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Maj
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.05.2.00.01.01.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Luas Kawasaan Konservasi Perairan Daerah yang dibina (ha)**		**411.342,80**	**3.300.000.000,00**			**411.342,80**
1.02.05.2.00.01.01.17.044	Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang mengalami kerusakan/degradasi dapat dipulihkan dan tersedianya tracking mangrove di wilayah pesisir	Kab. Rokan Hilir. Kab. Kep. Meranti, Kab. Indragiri Hilir	50 ha, 1.500 meter	3.300.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik**		**100 Persen**	**2.133.350.000,00**			**100 Persen**
2.00.01.2.00.01.01.01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah rekening	Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPT	108 rekening	680.400.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan (orang)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	96	250.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	10	50.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak dan dijilid	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	8 dan 11	60.850.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01.012	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (unit)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	9	25.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	4	196.500.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan (eksemplar)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	8	25.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (porsi)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	4800	130.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01.018	Rapat - Rapat Koordanasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pusat dan Daerah	75 kali	500.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (orang)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	72 kali	165.600.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.01.022	Penyediaan Jasa sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD	Jumlah media informasi dan komunikasi (edisi)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	2	50.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja**		**100 persen**	**273.050.000,00**			**100 Persen**
2.00.01.2.00.01.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara (m2)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	30	87.450.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara (unit)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	11	85.600.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	6	100.000.000,00	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Maj
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.00.01.2.00.01.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur**		**100 persen**	**37.400.000,00**			**100 Persen**
2.00.01.2.00.01.01.03.006	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah fisik dan mental aparatur yang dbina (orang)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	140	37.400.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Persentase ketepatan penyampaian laporan**		**100 persen**	**665.191.000,00**			**100 Persen**
2.00.01.2.00.01.01.06.006	Rapat Koordinasi pada Setiap SKPD	Jumlah Kab/Kota yang Menghadiri Rapat dan Kesepakatan Hasil Rakor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	12 dan 10	105.290.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.06.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen) dan frekuensi monev	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	12 dan 30	298.701.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.06.017	Supervisi dan Statistik	Jumlah laporan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	1	50.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.06.121	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan (orang)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	9	211.200.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.17	**Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut**	**Berkurangnya IUU Fishing**		**5 kasus**	**672.327.800,00**			**3 Kasus**
2.00.01.2.00.01.01.17.003	Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS	Jumlah POKWASMAS yang dibina dan di nilai	11 Kab/Kota	30 kelompok	100.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.17.004	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	Jumlah gelar operasi dan pengawasan terpadu (kali)	7 Kab/Kota	14	316.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.17.010	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Jumlah kapal yang dipelihara (unit)	Kota Dumai	1	256.327.800,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.20	**Program Pembangunan Budidaya Perikanan**	**Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya**		**125.173,47**	**18.298.523.000,00**			**136.000,00**
2.00.01.2.00.01.01.20.001	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah calon induk ikan unggul	BBIS Sei Tibun dan Dempond Kampar	25000 ekor benih	200.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.20.004	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan	Kuansing, Kampar, Pelalawan	15 orang	100.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.20.016	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	Jumlah pengerjaan sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT Pembenihan	BBIS Sei Tibun Kampar dan Rupat	2 paket	263.473.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.20.042	Pengembangan Tekhnologi Anjuran Perikanan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang menerapkan tekhnologi anjuran perikanan budidaya (CBIB)/orang	Pelalawan, Kuansing, Pekanbaru dan Inhil	50 unit	200.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.20.045	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Jumlah bantuan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi (unit/paket)	Rohil, Inhil, Dumai dan Meranti	46 paket	16.898.050.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.20.055	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pembenihan	Jumlah pelayanan UPT Pembenihan dalam menunjang produksi benih (paket)	BBIS Sei Tibun. Dempond Kampar	2 paket	637.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.21	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**Meningkatnya Hasil Tangkapan Perairan Laut**		**135.603 ton**	**4.209.575.000,00**			**136.000**
2.00.01.2.00.01.01.21.010	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan	Dokumen operasional pelabuhan perikanan	PPI Tanjung Samak	1	187.517.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.21.014	Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap	Jumlah kapal dan alat tangkap ikan untuk masyarakat nelayan	Kab/Kota	15 unit	3.672.058.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.21.053	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	Jumlah perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan (surat izin)	7 Kab/Kota	50 izin	150.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.21.054	Percepatan Kartu Nelayan	Jumlah nelayan yang memiliki kartu nelayan (orang)	12 Kab/Kota Se Provinsi Riau	4600 orang nelayan	200.000.000,00	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Maj
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.00.01.2.00.01.01.23	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan**	**Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pemasaran Nilai Ekspor Produk Perikanan**		**10 unit Usaha : US$ 8.800**	**3.003.900.000,00**			**8.900.000,00**
2.00.01.2.00.01.01.23.035	Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah pengolah hasil perikanan yang terampil (orang)	Kab. Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru	60	75.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.23.038	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin (unit)	Kab. Bengkalis, Kota Dumai dan Kab. Rohil	45	300.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.23.041	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah serftifikat yang diberikan bagi UMKM pengolahan hasil perikanan	5 Kab/Kota	5	150.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.23.044	Pameran/ Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah keikutsertaan dalam pameran/bazar produk pengolahan hasil perikanan (kali)	Pekanbaru, Surabaya, Batam	48	400.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.23.045	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah inovasi menu serba ikan	Pekanbaru	36	500.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.23.052	Lomba dan Penilaian UMKM terbaik se- Provinsi Riau	Jumlah UMKM yang memenuhi persyaratan lomba / penilaian terbaik	12 Kab/Kota	12	97.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.23.053	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah sosialisasi GEMARIKAN (kali)	Kota Pekanbaru	4	400.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.23.054	Pembinaan dan Pengawasan LPPMHP	Tercapainya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan di Provinsi Riau (unit) UMKM	12 Kab/Kota	12 UPI (UMKM)	79.940.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.23.055	Pengujian Mutu LPPMHP	Peningkatan sumberdaya manusia LPPMHP; jumlah sampel yang diuji	Provinsi Riau	25 orang; 100 sampel uji	551.960.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.23.056	Peningkatan Pelayanan LPPMHP	Meningkatnya jumlah sarana prasarana; jumlah tenaga pelayanan LPPMHP	LPPMHP Provinsi Riau, Dumai	1 unit; 4 personel	200.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.23.057	Pembinaan Produk Perikanan Non Konsumsi	Jumlah pengolah hasil produk non konsumsi yang terampil	Pekanbaru	25 orang	250.000.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.27	**Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan**	**Peningkatan jumlah SDM bidang perikanan dan kelautan yang bersertifikat (CPIP dan CBIB)**		**50**	**1.479.949.000,00**			**50**
2.00.01.2.00.01.01.27.005	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	Jumlah petambak yang terlatih (orang)		50	493.359.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.27.009	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	Jumlah sarana dan prasarana UPT pelatihan dalam mendukung operasional pelatihan (unit)	7 Kab/Kota	1	423.090.000,00	APBD		
2.00.01.2.00.01.01.27.017	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Jumlah pelayanan operasional UPT pelatihan dalam menunjang pelatihan	Kab. Kepulauan Meranti	1	563.500.000,00	APBD		
2.00.03.2.00.01.01.20.	**Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan**	**Terwujudnya pengembangan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan**		**100 orang**	**200.000.000,00**			**116 orang**
2.00.03.2.00.01.01.20.036	Peningkatan Sumberdaya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembinaan penyuluh dan pendamping dalam mendukung pengembangan kelautan dan perikanan (orang/kelompok)	Kabupaten/Kota	4	200.000.000,00	APBD		
JUMLAH					**34.273.265.800,00**			

Pekanbaru, Juni 2017

Plt KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERI

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN , M.Si

NIP. 19651002 199403 1 006

u Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(10)
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.770.000.000,00
-
300.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
30.000.000,00
250.000.000,00
30.000.000,00
150.000.000,00
600.000.000,00
170.000.000,00
100.000.000,00
350.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00

u Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(10)
60.000.000,00
60.000.000,00
719.800.000,00
150.000.000,00
300.000.000,00
55.000.000,00
214.800.000,00
-
-
-
-
1.800.000.000,00
300.000.000,00
-
500.000.000,00
-
-
1.000.000.000,00
5.800.000.000,00
-
5.000.000.000,00
500.000.000,00
300.000.000,00

u Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(10)
5.800.000.000,00
200.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
500.000.000,00
700.000.000,00
300.000.000,00
500.000.000,00
200.000.000,00
600.000.000,00
1.800.000.000,00
300.000.000,00
-
-
-
-
250.000.000,00
250.000.000,00
19.549.800.000,00

KANAN